



Bab 2

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014

Sebagai daerah yang memiliki wilayah luas dan kondisi geografis strategis, Provinsi Kalimantan Tengah berusaha mengoptimalkan setiap potensi sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sebagai subyek pengelola pembangunan wilayah. Oleh karena itu, setiap tahapan demi tahapan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan hingga saat ini sebagai upaya pencapaian target pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Untuk lebih meningkatkan kuantitas utamanya kualitas hasil pembangunan, evaluasi program kegiatan maupun capaian kinerja pemerintah daerah harus dilaksanakan sebagai syarat mutlak penentuan keberhasilan perencanaan pembangunan yang telah disusun pada periode sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya yang dirumuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 dan diturunkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 merupakan gambaran hasil dari pelaksanaan kinerja pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan selama tahun 2014. Evaluasi yang harus terintegrasi antar dokumen perencanaan ini memiliki tujuan khusus dalam menyempurnakan setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

Selain itu terdapat pula analisa singkat terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, hingga permasalahan pembangunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja aparatur kelembagaan pemerintahan yang akan datang.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang berdiri setelah adanya restrukturisasi provinsi di Pulau Kalimantan dimana dahulu jika merunut wilayah geografisnya maka merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari geografisnya, Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki cukup banyak karakteristik Pulau Kalimantan yakni luasnya wilayah hutan, rawa-rawa, hingga gambut. Selain itu juga masih banyak sungai-sungai yang



melewati berbagai wilayah di daratan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sungai Barito sebagai sungai yang terpanjang (mencapai 900 km).

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki ibukota provinsi di Kota Palangka Raya yang berada di tengah wilayah Kalimantan Tengah atau berada di titik sentral seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjadikan pembangunan daerah antara ibukota provinsi dan kabupaten memiliki kesetaraan dalam pencapaian kualitas pembangunan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki kelebihan dalam pencapaian pembangunan daerah seperti Kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Utara, maupun Kotawaringin Barat. Simultannya pembangunan daerah yang terjadi di setiap kabupaten/kota ini dimungkinkan karena letak pusat pemerintahan yang strategis sehingga membuka peluang tumbuhnya wilayah-wilayah yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan letak, luas dan batas wilayah, kondisi topografi, geologi dan tanah, hidrologi, dan klimatologi.

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Berdasarkan lokasinya, Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' Bujur Timur hingga 115°51' Bujur Timur. Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki batas-batas wilayah dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan yakni sebagai berikut:

Batas utara : Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;

Batas timur : Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;

Batas selatan : Laut Jawa; serta

Batas barat : Kalimantan Barat.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai ±153.564,5 km².

2. Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan topografi yang relatif datar mulai dari wilayah bagian selatan, tengah, dan menerus dari barat hingga ke timur. Pada sektor tengah, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi landai hingga kemiringan tertentu dan memiliki pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sedangkan pada sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam dan bagian wilayah ini memanjang



dari barat daya ke timur. Titik tertinggi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian mencapai 1.660 meter dpl.

3. Geologi dan Tanah

Dalam rangka pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, berbagai data dan informasi dasar terkait dengan potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung, dan kerawanan fisik berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan. Perihal potensi kesuburan tanah, wilayah-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah tergolong memiliki potensi kesuburan rendah. Menurut tingkat kesuburannya, tanah di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kelas IV, V, dan III dengan jenis tanah terdiri dari Organosol, Aluvial, Regosol, PMK, Podsol, Latosol, Litosol, dan Laterit.

4. Hidrologi

Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalir beberapa sungai besar yang berhulu di sektor utara. Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai kemiringan yang rendah hingga ke sektor tengah sehingga jangkauan pengaruh pasang air laut (khususnya pada musim kemarau) relatif jauh. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah dataran yang dilintasinya. Selain itu, rawa gambut terdapat hingga ke sektor tengah dan pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Sedangkan wilayah bagian hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan kemiringan tinggi bahkan beriam.

5. Klimatologi

Iklm di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam tipe A dengan iklim tropis yang lembab dan panas. Pengukuran iklim di Provinsi Kalimantan Tengah hanya berada pada titik-titik tertentu seperti yang tertera di table 2.1. Berdasarkan pengamatan klimatologi, suhu udara maksimum mencapai 36,8 derajat celcius yang berada di Buntok, namun rata-rata suhu udara tertinggi berada di Kota Palangka Raya dan Muara Teweh yakni mencapai 27,1. Selain itu, kelembaban udara dan persentase penyinaran matahari tertinggi berada di Pangkalan Bun, namun curah hujan bulanan tertinggi berada di Buntok.

Tabel 2.1
Klimatologi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013

No	Indikator	Pangkalan Bun	Sampit	Buntok	Muara Teweh	Palangka Raya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Suhu Udara					
	- Maksimum	35,8	35,6	36,8	36,2	35,8
	- Minimum	19,4	19,6	20,1	16,8	20,4
	- Rata-rata	26,7	26,9	26,9	27,1	27,1



No	Indikator	Pangkalan Bun	Sampit	Buntok	Muara Teweh	Palangka Raya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	89	84	85	84	85
3	Tekanan Udara (mbs)	1.009,5	1.010,8	1.012,3	1.012,3	1.012,5
4	Kecepatan Angin (knot)	2,5	2,5	3,3	3,5	2,9
5	Curah Hujan Bulanan (m3)	2.882,1	2.890,2	3.281,3	3.183,1	3.259,5
6	Penyinaran Matahari (%)	60	55	55	55	57

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka 2014

6. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan pola lahan areal hutan, pola penggunaan lahan areal non hutan

a. Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan

Kondisi-kondisi fisik wilayah secara alamiah menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori bio-region hutan. Selain itu, pola penggunaan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah juga masih menampilkan dominasi kelompok penggunaan hutan. Hingga saat ini, wilayah hutan mendominasi di semua kabupaten/kota (termasuk di wilayah Kota Palangka Raya) kecuali di Kabupaten Barito Timur dominasi wilayah hutan kurang dominan.

b. Pola Penggunaan Lahan Areal Non Hutan

Areal non hutan didominasi oleh jenis-jenis penggunaan lahan pertanian. Areal-areal penggunaan pertanian non perkebunan besar dan areal pemukiman berkembang sepanjang sungai-sungai besar yang melintasi daratan. Meskipun begitu, areal-areal perkebunan besar memulai pola perkembangan berbeda dimana tidak cenderung mengikuti sungai besar karena disesuaikan dengan infrastruktur penunjang lainnya seperti aksesibilitas wilayah hingga tipologi jenis tanah.

7. Kawasan Rawan Bencana

Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 153,564 Km² (15.356.700 Ha) memiliki lahan gambut di wilayah selatan seluas 3.010.640 Ha dengan kedalaman 0-2 Meter seluas 1.496.875 Ha dan kedalaman di atas 2 Meter seluas 1.513.765 Ha. Lahan gambut ini merupakan daerah rawan kebakaran karena telah mengalami degradasi akibat pembukaan kanal untuk proyek PLG.



Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dilaporkan bahwa pada tahun 2013 telah terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan di 5 (lima) kabupaten yaitu Gunung Mas, Murung Raya, Pulang Pisau, Seruyan, dan Kota Palangka Raya. Sementara itu, bencana yang paling sering terjadi selama tahun 2013 adalah bencana kebakaran gedung dan pemukiman dimana pada tahun tersebut tercatat 28 kejadian kebakaran yaitu di Kota Palangka Raya sebanyak 13 kejadian, Kabupaten Barito Utara 5 kejadian, Kabupaten Kapuas dan Kotawaringin Barat masing-masing 3 kejadian, Kabupaten Murung Raya 2 kejadian, serta Kabupaten Gunung Mas dan Kotawaringin Timur masing-masing sebanyak 1 kejadian. Bencana lainnya yang cukup rawan terjadi adalah banjir dimana selama tahun 2013 telah terjadi 20 kejadian bencana banjir dengan jumlah kejadian yang cukup tinggi yaitu di Kabupaten Barito Utara, Katingan, Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya.

8. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan penduduk yang merupakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting adanya melihat pertumbuhan demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

a. Gambaran Umum Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah

Pada Provinsi Kalimantan Tengah terjadi pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 ke 2013 sebesar 2,36 sehingga menyebabkan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 menjadi sebanyak 2.384.700 jiwa yang terdiri atas 1.243.800 laki-laki dan 1.140.900 perempuan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, penyebaran penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tampak masih bertumpu pada beberapa kabupaten induk. Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Kotawaringin Barat adalah tiga kabupaten dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk mayoritas dengan masing-masing kabupaten dihuni penduduk berjumlah 405.700 orang, 341.600 orang, dan 261.200 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang minoritas berada di Kabupaten Sukamara dan Lamandau dengan penduduk yang berjumlah 51.100 orang dan 69.700 orang.

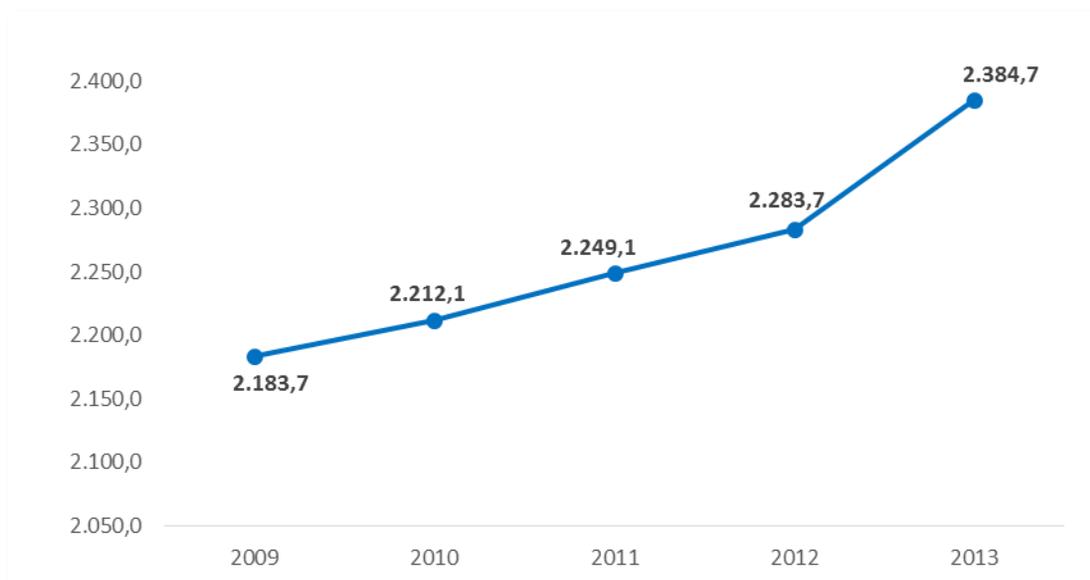


Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2011-2013

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Waringin Barat	239.753	245.143	261.200
2	Kota Waringin Timur	380.443	385.863	405.700
3	Kapuas	335.168	339.262	341.600
4	Barito Selatan	126.207	126.300	129.200
5	Barito Utara	123.610	123.781	125.400
6	Sukamara	45.706	47.073	51.100
7	Lamandau	64.258	65.616	69.700
8	Seruyan	142.275	146.914	160.600
9	Katingan	148.892	150.314	155.100
10	Pulang Pisau	122.073	122.511	123.300
11	G.Mas	98.615	100.157	104.900
12	Barito Timur	99.003	101.054	107.300
13	Murung Raya	98.480	100.100	105.100
14	Kota Palangkaraya	224.663	229.599	244.500
Kalimantan Tengah		2.249.146	2.283.687	2.384.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2014

Gambar 2.1
Perkembangan Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2014

Provinsi Kalimantan Tengah dihuni oleh hampir seluruh anak suku bangsa yang ada di Indonesia dengan kepadatan penduduk sekitar 15-16 orang per kilometer persegi. Meskipun sudah banyak kebudayaan multietnis dan multi budaya yang



hadir di Provinsi Kalimantan Tengah, namun etnis awal yaitu suku Dayak masih eksis berkembang di beberapa wilayah.

b. Sex Ratio Penduduk Kalimantan Tengah

Data *Sex Ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. *Sex ratio* penduduk Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 sebesar 109, yang memiliki arti bahwa disetiap 100 penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus pembangunan daerah yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Penjabaran pada masing-masing fokus aspek kesejahteraan masyarakat dapat terlihat pada analisa di bawah ini:

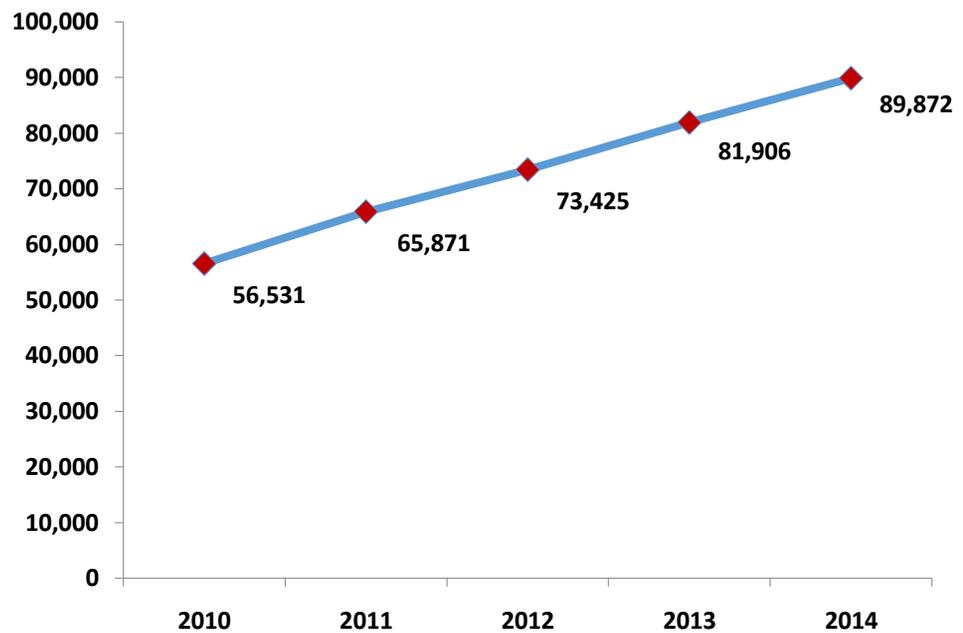
1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi memperlihatkan kondisi perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah baik secara makro maupun mikro.

a. Pertumbuhan PDRB Regional

Pembangunan daerah tidak pernah terlepas dari pertumbuhan ekonomi regional baik mikro maupun makro. Berkenaan dengan hal tersebut, sektor-sektor lapangan usaha yang memberikan nilai tambah bagi produksinya akan menjadikan roda ekonomi wilayah berputar meskipun ada beberapa investasi yang berasal dari luar daerah. Kontribusi sektor ekonomi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan sector andalan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Gambar 2.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun Dasar 2010 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014
(Milyar Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

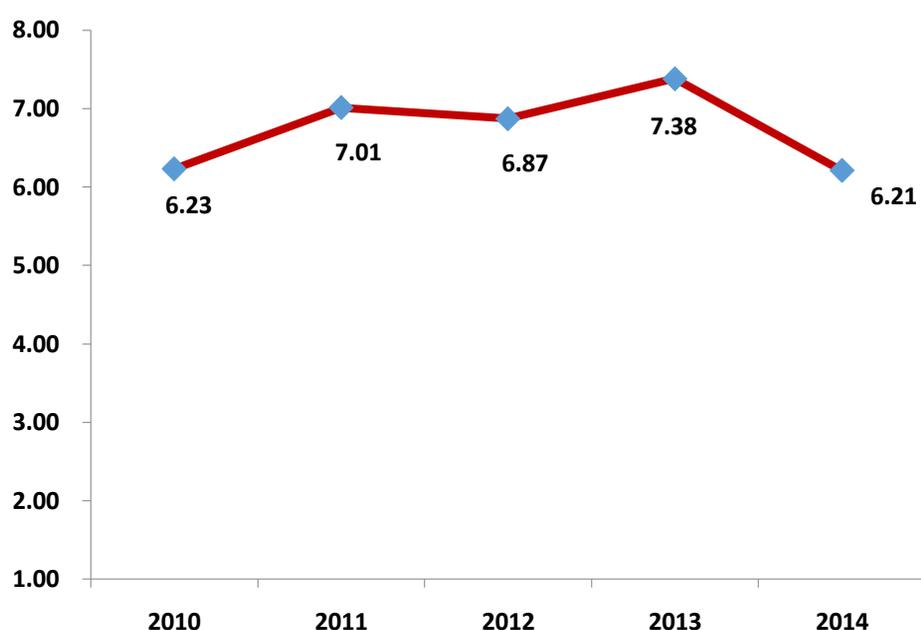
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di masyarakat yang terlihat dari nilai tambah suatu produk/olahan produk di wilayah tersebut. Struktur ekonomi suatu wilayah juga dapat terlihat dari data PDRB karena setiap sector ekonomi memiliki andil tersendiri dalam membentuk peta perekonomian wilayah.

Secara definitif, PDRB adalah jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Di Provinsi Kalimantan Tengah, terjadi kenaikan nilai PDRB dari tahun ke tahun secara konsisten dimana pada tahun 2014, angka PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yang diukur berdasarkan atas dasar harga berlaku mencapai Rp.89.872 miliar.

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah cukup stabil di antara kisaran 5% hingga 7%. Pada tahun 2014, ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh 6,21 % melambat dibanding tahun 2013 yang sebesar 7,38 %.



Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010-2014 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2013-2014 (Persen)

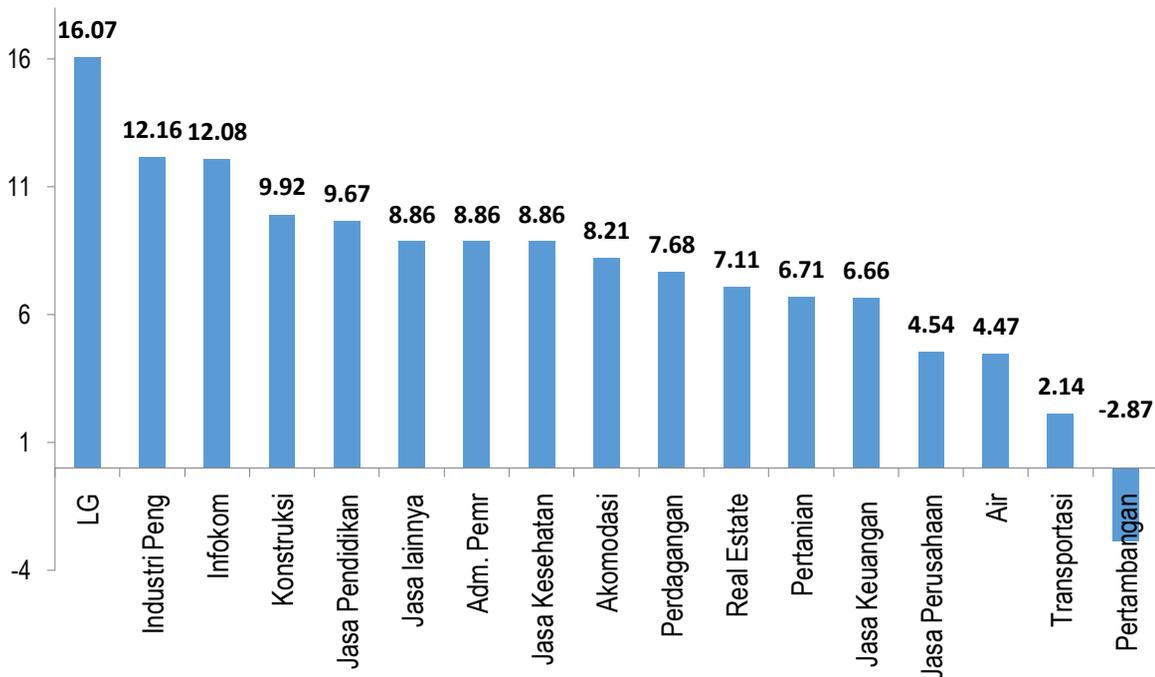
No.	Lapangan Usaha	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,46	6,71
2	Pertambangan dan Penggalian	15,97	-2,87
3	Industri Pengolahan	7,89	12,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,06	16,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	5,40	4,47
6	Konstruksi	3,08	9,92
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,29	7,68
8	Transportasi dan Pergudangan	11,52	2,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,00	8,21
10	Informasi dan Komunikasi	9,90	12,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,55	6,66
12	Real estate	6,99	7,11
13	Jasa Perusahaan	7,76	4,54
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,00	8,86
15	Jasa Pendidikan	4,55	9,67
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,77	8,86
17	Jasa Lainnya	4,98	8,86
Kalimantan Tengah		7,38	6,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 16,07 persen, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 12,16 persen dan informasi komunikasi sebesar 12,08 persen.

Gambar 2.4

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 (%)**



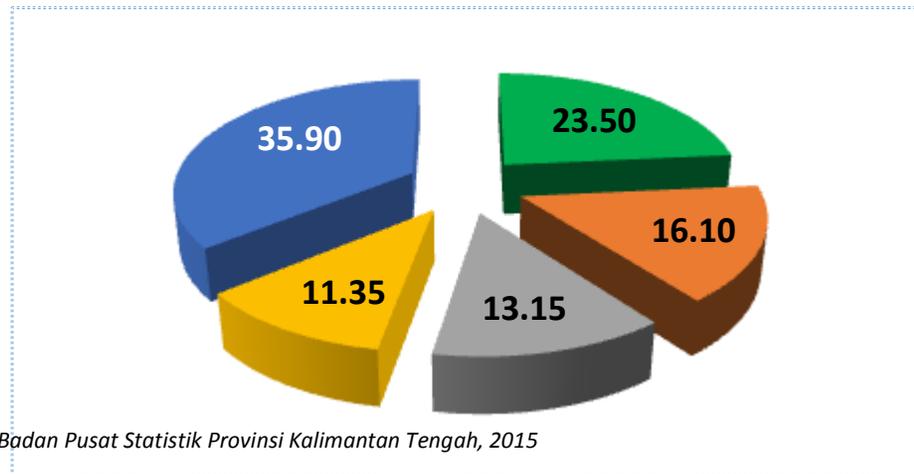
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 15,97 persen terjadi penurunan cukup besar yang mana pada tahun 2014 terdapat pertumbuhan negatif sebesar 2,87 persen, hal ini disebabkan karena adanya pemberlakuan Undang Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mengatur larangan ekspor mineral dalam bentuk mentah yang mulai berlaku 12 Januari 2014, dengan tujuan untuk menaikkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya Undang-undang ini, pengusaha dilarang mengeksport enam jenis bahan mentah yaitu emas, nikel, bauksit, bijih besi, tembaga dan batu bara sebelum diolah.

b. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (23,50 persen), Industri Pengolahan (16,10 persen) dan Pertambangan dan Penggalian (13,15 persen).

Gambar 2.5
Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 (%)

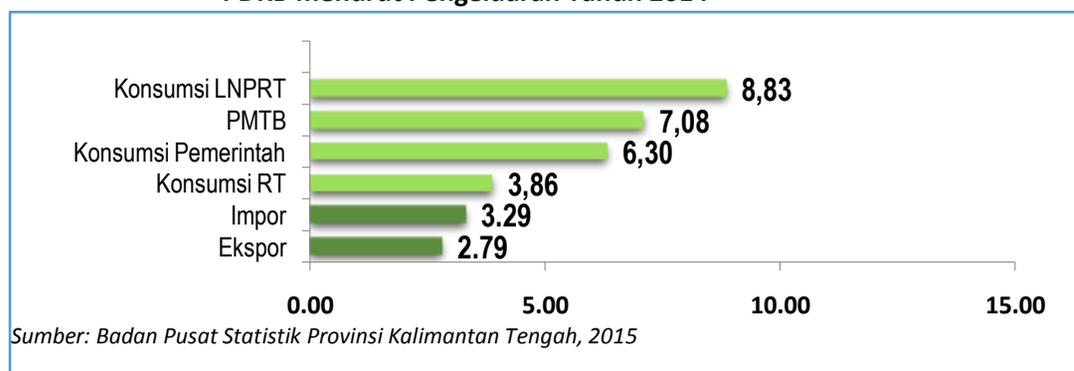


Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2014, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,76 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan, Perikanan 1,45 persen, dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,82 persen)

c. PDRB Menurut Penggunaan

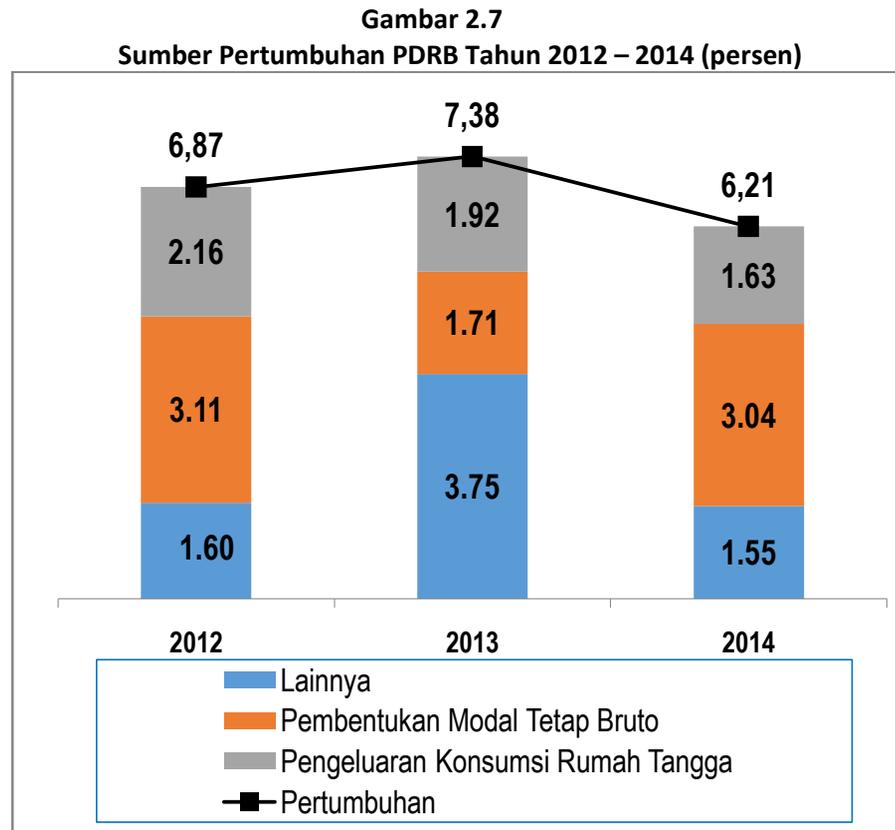
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 terjadi pada seluruh komponen. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,83 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,08 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,30 persen.

Gambar 2.6
PDRB menurut Pengeluaran Tahun 2014



Struktur Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2014 menurut pengeluaran didominasi oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (45,03 persen), diikuti Komponen Ekspor (42,99) dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (42,54 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2014, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 3,04 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,63 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Tabel 2.4
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2013-2014 (Persen)

No.	Komponen	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,43	3,86
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,08	8,83
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,64	6,30
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3,86	7,08
5	Perubahan Inventori	-20,60	123,99
6	Ekspor Barang dan Jasa	12,33	2,79
7	Dikurangi impor Barang dan Jasa	5,22	3,29
Kalimantan Tengah		7,38	6,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

**d. Inflasi**

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS yang tersaji pada tabel 2.5, Jika ditinjau dari inflasi kumulatifnya inflasi Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan IV-2014 mencapai 7,07 persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan inflasi nasional (8,36%), namun lebih tinggi dari rata-rata inflasi Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu 6 tahun sebelumnya (tahun 2008-2013) yaitu 6,75 persen.

Tabel 2.5
Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007-2015 (%)

Keterangan (Inflasi-yoy)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Inflasi Tahunan Palangka Raya	11,65	1,39	9,49	5,28	6,73	6,45	6,63
Inflasi Tahunan Sampit	8,89	2,85	9,53	3,60	4,69	7,25	7,90
Inflasi Kalimantan Tengah	10,44	2,02	9,51	4,55	5,85	6,79	7,07
Inflasi Nasional	11,06	2,78	6,96	3,79	4,3	8,38	8,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2014

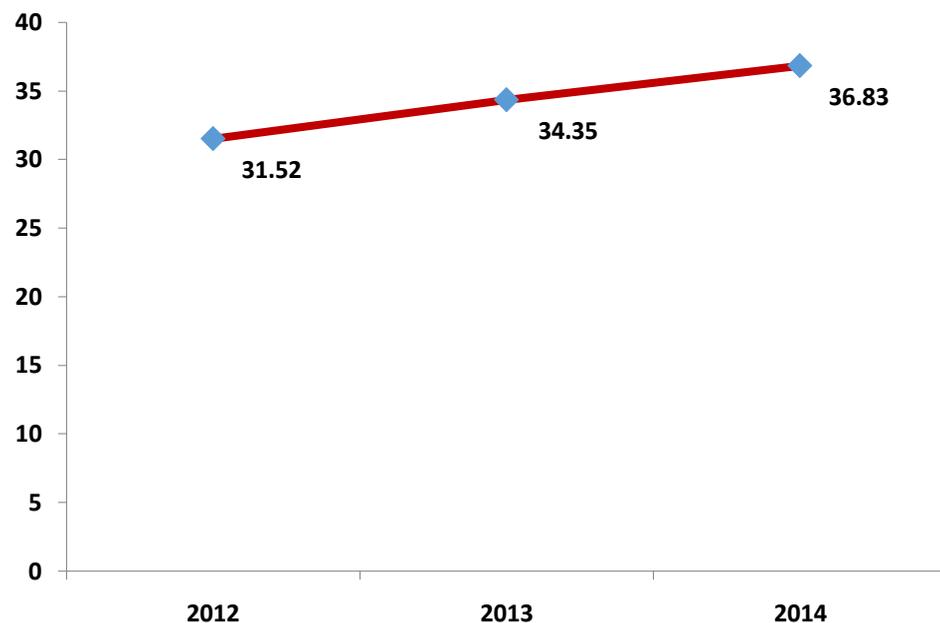
Dengan stabilnya tekanan inflasi pada Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari realisasi inflasi Kota Palangka Raya sebesar 6,63 persen dan Sampit sebesar 7,90 persen. Tekanan inflasi terbesar di Kota Palangka Raya dan Sampit tersebut masing-masing terjadi pada Desember 2013 dengan inflasi bulanan mencapai 1,69 persen dan 2,01 persen sehingga inflasi Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan tersebut mencapai 1,80 persen.

e. PDRB per Kapita

Perkembangan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti dengan penambahan jumlah penduduk akan berdampak pada fluktuasi PDRB perkapita. Sedangkan PDRB per kapita dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan suatu daerah meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata karena PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan.

PDRB perkapita penduduk Provinsi Kalimantan Tengah atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2012 hingga tahun 2014. Pada tahun 2012, PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Tengah hanya sebesar Rp.31,52 juta per tahun dan nilai tersebut terus meningkat hingga mencapai Rp.36,83 juta pada tahun 2014.

Gambar 2.8
PDRB per Kapita Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2014 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

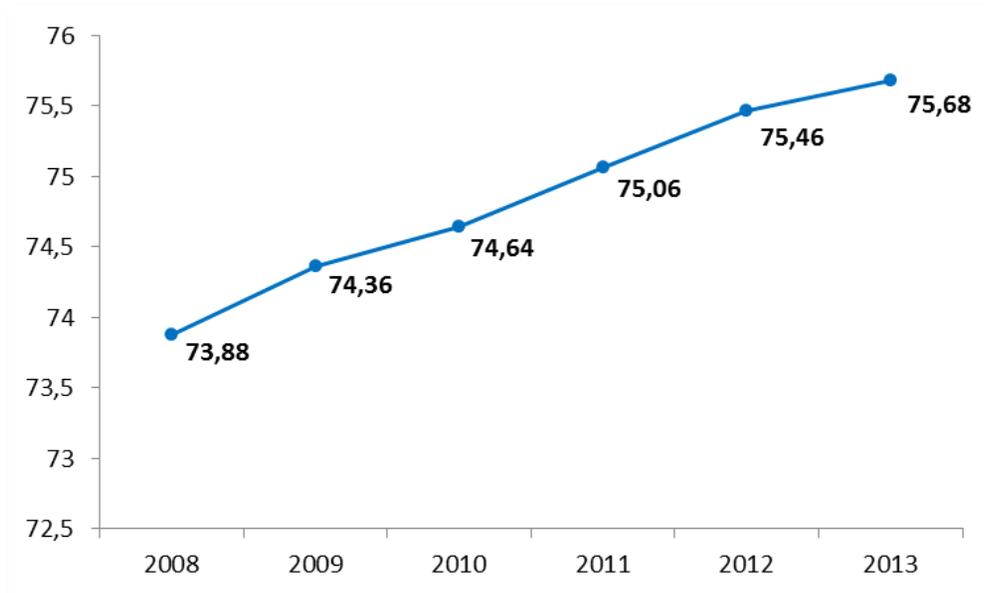
Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta seni budaya dan olahraga.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka

harapan hidup), pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi (paritas daya beli).

Gambar 2.9
Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2014

Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2008, IPM Provinsi Kalimantan Tengah sudah termasuk kategori tinggi, yakni mencapai angka 73,88 dan seiring berjalannya waktu, IPM terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga pada tahun 2013 IPM hingga mencapai angka 75,68. Peningkatan IPM yang konsisten di tiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan komponen-komponen penyusunnya baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomiannya.

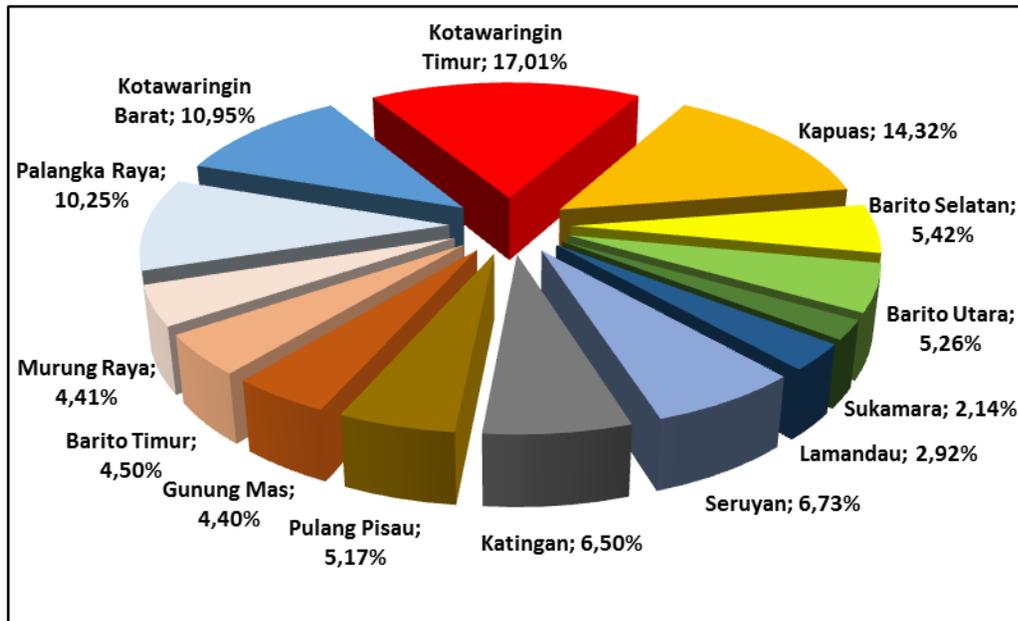
b. Kependudukan

Pembangunan sumberdaya manusia menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan akan menjadi “peta” awal dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis sumber daya manusia.

Berdasarkan data statistik kependudukan 2013, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2.384.700 orang, yang terdiri atas 1.243.800 laki-laki dan 1.140.900 perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi

Kalimantan Tengah tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 mencapai 2,36 persen per tahun yang disebabkan karena penambahan/pengurangan penduduk alami maupun karena migrasi keluar/masuk.

Gambar 2.10
Distribusi Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2014

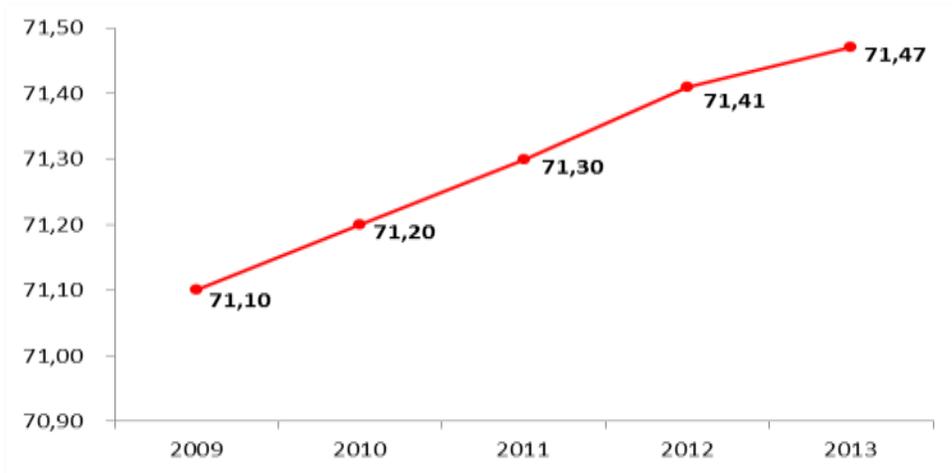
Distribusi penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikatakan cukup merata dan berimbang antara satu kabupaten dengan kabupaten/kota lain meskipun masih ada beberapa kabupaten yang dominan dihuni sebagian besar penduduk. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar diantara kabupaten/kota lain yang mencapai 17,01 persen penduduk berdomisili di kabupaten tersebut. Sedangkan kabupaten yang penduduknya paling sedikit berada di Kabupaten Sukamara (2,14%). Di sisi lain, ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya) sebagai pusat pemerintahan dihuni oleh 10,25 persen dari total penduduk.

c. Kesehatan

Capaian di bidang kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2009-2013. Hal ini disebabkan karena perbaikan-perbaikan sarana prasarana fasilitas kesehatan diiringi dengan penambahan kuantitas maupun kualitas sumber daya kesehatan baik dokter, tenaga medis, dan lainnya. Pencapaian positif di bidang kesehatan ini dapat terlihat dari trend kenaikan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 yang

mencapai 71,47 tahun yang berarti bahwa bayi yang baru dilahirkan pada tahun 2013 memiliki peluang hidup hingga berumur 71-72 tahun.

Gambar 2.11
Angka Harapan Hidup
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2013 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2014

d. Pendidikan

Secara umum, bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk. Pada tahun 2014, angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 99,59 persen yang berarti hanya memiliki penduduk buta huruf sebanyak 0,41 persen. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk Kalimantan Tengah mencapai 8,17 tahun yang mengindikasikan bahwa penduduk rata-rata menduduki jenjang pendidikan formal selama 8,17 tahun atau mencapai Sekolah Menengah Lanjutan Pertama (SLTP) kelas 8 semester 1.

Tabel 2.6
Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2009-2014

No	Tahun	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2009	97,69	8,02
2	2010	97,78	8,03
3	2011	97,84	8,06
4	2012	97,88	8,15
5	2013	97,99	8,17
6	2014	99,59	8,17

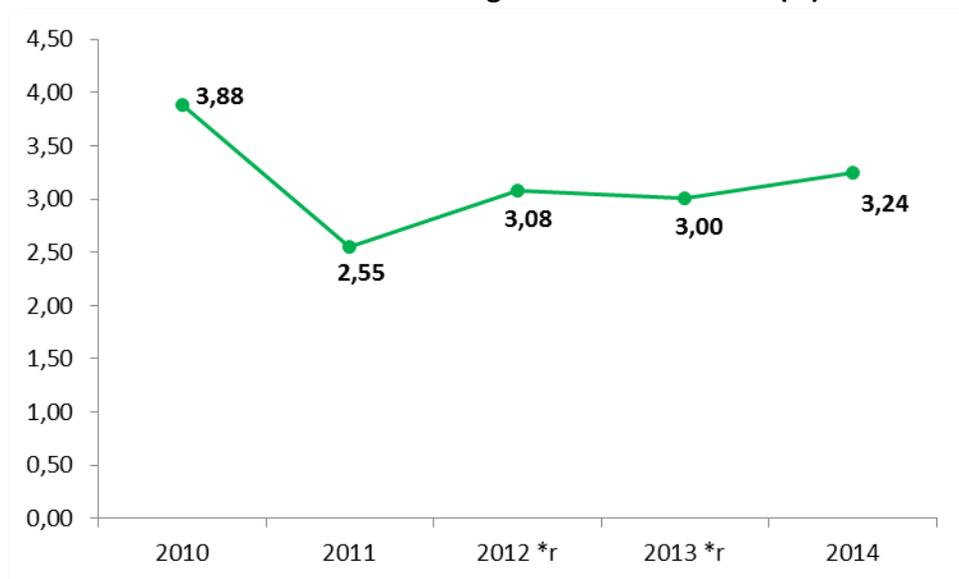
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2014

e. Pengangguran

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2014 mencapai 1.193.171 orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,56 persen. Angka tersebut hanya meningkat 0,06 persen dibanding TPAK yang tahun sebelumnya. Secara umum, TPAK di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang bekerja sebanyak 1.154.489 orang. Secara absolut, jumlah penduduk yang bekerja semakin menurun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi fluktuatif pengangguran namun tidak signifikan. Di tahun terakhir yakni Agustus 2014, pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 3,24 persen. Angka tersebut tergolong kecil jika dibandingkan angka nasional, namun meskipun begitu terdapat trend kenaikan angka pengangguran yang tergambar pada gambar grafik di bawah ini.

Gambar 2.12
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014 (%)



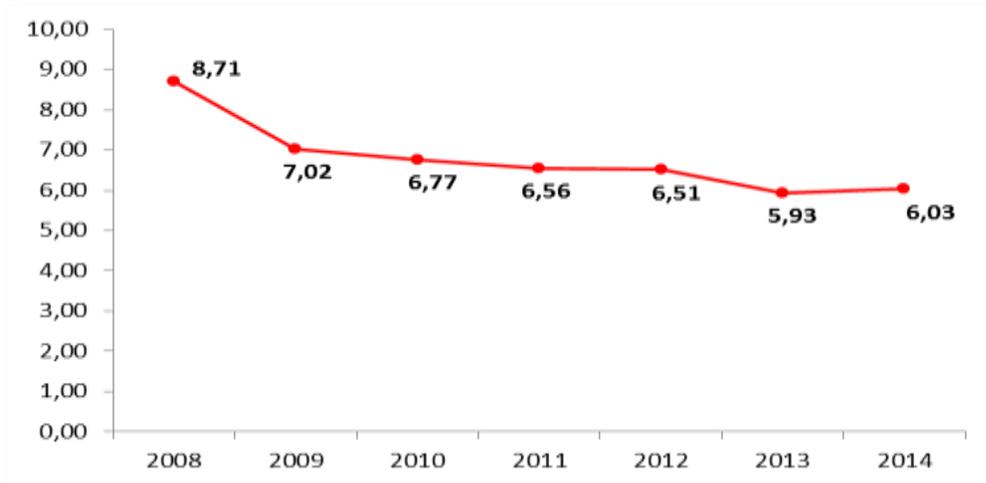
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2014

f. Kondisi Kemiskinan

Secara umum, angka kemiskinan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara bertahap namun konsisten. Pada tahun 2008, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 8,71 persen yang pada tahun berikutnya langsung menurun

drastis hingga mencapai angka 7,02 persen. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, tingkat kemiskinan secara konsisten menurun landai hingga akhirnya pada tahun 2013 mencapai 5,93 persen (titik terendah kemiskinan) dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 6,03 persen.

Gambar 2.13
Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2014 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2014

g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan nasional maupun regional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi perempuan dan anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu, pembangunan harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang salah satunya tercermin dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender serta hak-hak anak yang tidak terabaikan.

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, disamping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi



politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat.

h. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya, dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan tersier. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial, budaya, dan keagamaan yaitu:

- i. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; serta
- ii. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Kesadaran akan pentingnya seni dan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta menciptakan iklim kondusif dan harmonis. Sedangkan pembangunan dan kemajuan di bidang olahraga, selain mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang kesehatan, juga meningkatkan martabat dan nama baik negara/daerah dalam pergaulan nasional dan daerah.

Pada tahun 2013, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 343 grup kesenian/sanggar seni dengan penyelenggaraan festival seni dan budaya sekali dalam tahun tersebut. Selain itu, terdapat pula 487 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Tabel 2.7
Statistik Seni, Budaya, dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2014

No	Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (buah)	168	343	343	343	-
2	Jumlah gedung (unit)	10	19	19	19	-
3	Jumlah klub olahraga (buah)	50	-	-	26	-
4	Jumlah gedung olahraga (unit)	15	15	15	15	-
5	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	2	2	1	-
6	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	490	487	487	487	-
7	Jumlah organisasi pemuda	62	66	66	66	65



No	Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Jumlah organisasi olahraga	42	42	42	42	43
9	Jumlah kegiatan kepemudaan	50	67	60	60	40
10	Jumlah kegiatan olahraga	27	31	35	45	76
11	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah)	33	33	34	37	37
12	Lapangan olahraga (lapangan Volly, sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)	207	210	289	289	289

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2014 dan Dinas Pemuda dan OlahRaga Provinsi Kalteng, 2015

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemudaan menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam partisipasi membangun daerah. Adapun jumlah organisasi pemuda di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 66 organisasi dengan 40 kegiatan kepemudaan pada tahun 2014. Selain itu, kegiatan kepemudaan juga difasilitasi 37 gelanggang/balai remaja.

Sedangkan banyaknya jumlah organisasi olahraga (yang berada dibawah naungan KONI kabupaten/kota) menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga di Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini, jumlah organisasi olahraga yang berada di bawah binaan KONI Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 43 organisasi olahraga dengan 76 kali kegiatan olahraga pada tahun 2014. Selain itu, kegiatan keolahragaan juga difasilitasi 15 gedung olahraga dan 289 lapangan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang yakni bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan, dan sebagainya yang merupakan pelayanan wajib oleh pemerintah daerah dalam pembangunan. Sedangkan kondisi pelayanan pilihan dapat diketahui dari beberapa bidang yakni pertanian, pariwisata,



jasa dan perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, dan sebagainya yang menyangkut pelayanan pilihan oleh pemerintah daerah.

Fokus Pelayanan Urusan Wajib

a) Pendidikan

Gambaran umum keadaan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain tercermin dari angka partisipasi sekolah dan rasio guru terhadap murid. Angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 pada tahun 2010 mencapai 98,72 persen dan menurun menjadi 98,68 persen pada tahun 2014. Berbeda dengan pada penduduk usia 13-15 tahun, dimana angka partisipasi sekolahnya meningkat dari sebesar 82,09 persen pada tahun 2010 menjadi 88,90 persen pada tahun 2014. Sama halnya untuk penduduk usia 16-18 tahun, angka partisipasi sekolahnya meningkat dimana pada tahun 2010 memiliki angka partisipasi sekolah sebesar 62,24 persen dan meningkat menjadi 66,24 persen pada tahun 2014.

Rasio guru terhadap murid untuk setiap jenjang pendidikan dapat dikatakan seimbang sesuai dengan kebutuhannya dimana pada tahun 2012/2013, rasio guru SD/MI terhadap murid mencapai 1:25, sama halnya dengan tingkat SMP/MTS yang mencapai angka 1:22. Sedangkan rasio guru terhadap murid untuk tingkat SMA mencapai 1:20 pada tahun 2013/2014. Rasio guru terhadap murid baru sebatas berbicara tentang kuantitas guru yang mengajar di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk peningkatan kualitas sumber daya alam maka perlu adanya pengembangan kualitas guru-guru tersebut serta pemerataan guru di setiap wilayah.

Tabel 2.8
Angka Partisipasi Sekolah dan Rasio Guru terhadap Murid
Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010-2014

NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI					
1.1.	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun)*	98,72	98,70	98,90	98,87	98,68
1.2.	Rasio Guru terhadap Murid	1:13	1:15	1:17	1:19	1:25
2	SMP/MTs					
2.1.	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun)*	82,09	84,59	85,79	88,59	88,90
2.2.	Rasio Guru terhadap Murid	1:15	1:16	1:17	1:18	1:22



NO	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Angka Partisipasi Sekolah (16-18 tahun)*	62,24	63,20	64,30	65,24	66,24
3.2.	Rasio Guru terhadap Murid	1:14	1:16	1:17	1:18	1: 20

*capaian kinerja RPJMD 2010-2014 & BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2014

b) Kesehatan

Bidang kesehatan menggambarkan sarana dan prasana serta tenaga medis dan para medis yang terdapat pada Tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.9
Sarana dan Prasarana Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010-2014

No	Fasilitas Kesehatan	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rumah Sakit	18	18	18	19
2	Kapasitas tempat tidur RS	1.496	1.254	1.441	1.441
3	Puskesmas Induk	182	192	196	197
4	Puskesmas Pembantu	1.024	1.022	1.041	1.001
5	Polindes/ Poskesdes/ Rumah Bersalin	720	524	486	548
6	Dokter Gigi	90	113	146	113
7	Dokter Umum	480	533	564	568
8	Dokter Spesialis	74	106	118	197
9	Bidan	1.798	1.985	1.885	2.305
10	Perawat	4.221	4.863	3.928	4.745
11	Apoteker/Ass Apoteker	318	385	322	458

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2014 dan Dinas Kesehatan Prov. Kalteng, 2015

Sarana prasarana kesehatan untuk masyarakat yaitu rumah sakit, pada tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebanyak 19 buah yang terdiri dari 1 rumah sakit jiwa, 2 rumah sakit TNI/POLRI, 15 rumah sakit daerah, dan 1 rumah sakit swasta. Sedangkan untuk Puskesmas mengalami kenaikan menjadi 197 Puskesmas, sedangkan Puskesmas Pembantu mengalami penurunan menjadi 1.041 pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, jumlah dokter di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 878 orang yang terdiri dari 113 dokter gigi, 568 dokter umum, dan 197 dokter spesialis. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 828 dokter. Selain itu, untuk tenaga kesehatan lainnya seperti bidan



berjumlah 2.305 orang, perawat 4.745 orang, apoteker 149 orang dan asistern. apoteker309 orang.

c) Perhubungan

1. Jalan dan Angkutan Darat

Dari total panjang jalan nasional dan provinsi sepanjang 2.814,80 km, kondisi permukaan jalan baik mengalami penurunan dari 1.694,71 km di tahun 2013 menjadi 1.595,76 km pada tahun 2014; kondisi sedang rusak mengalami kenaikan dari 817,52 km di tahun 2013 menjadi 933,09 km; kondisi rusak mengalami penurunan dari 250,61 km di tahun 2013 menjadi 217,95 km; dan kondisi rusak berat mengalami penurunan dari 99,61 km di tahun 2013 menjadi 68,03 km di tahun 2014, seperti yang terlihat pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Panjang Jaringan Jalan Nasional dan Provinsi Berdasarkan Kondisi
Tahun 2010-2014

NO	Jalan (Nasional dan Provinsi)	Panjang Jalan (km)				
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1.	Kondisi Baik	1.476,62	1.431,92	1.694,71	1.647,08	1.595,76
2.	Kondisi Sedang Rusak	706,87	1.063,91	662,89	817,52	933,09
3.	Kondisi Rusak	430,86	459,46	312,69	250,61	217,95
4.	Kondisi Rusak Berat	724,22	383,29	144,54	99,62	68,03
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional dan provinsi)	3.338,5	3.338,5	2.814,8	2.814,8	2.814,83

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2015

2. Pelabuhan laut

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki pelabuhan laut sebagai sarana jasa perdagangan serta angkutan penumpang dan barang (ekspor dan impor maupun lokal) yang terdiri dari:

- a. Pelabuhan Pengumpul:
 - ✓ Pelabuhan Sukamara,
 - ✓ Pelabuhan Kumai,
 - ✓ Pelabuhan Pangkalan Bun,
 - ✓ Pelabuhan Sampit,



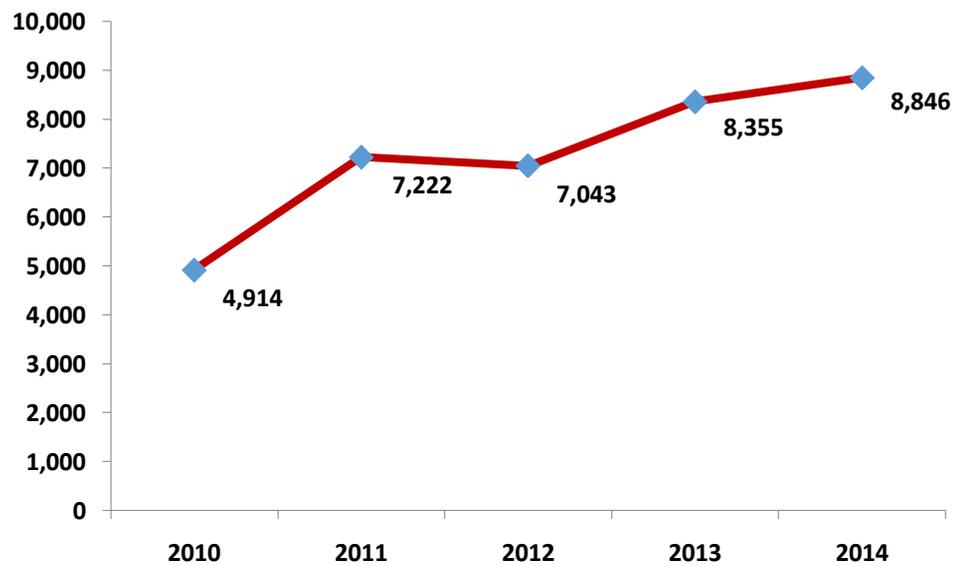
- ✓ Pelabuhan Pulang Pisau, dan
- ✓ Pelabuhan Kuala Kapuas.

b. Pelabuhan Pengumpan:

- ✓ Pelabuhan Pegatan Mendawai,
- ✓ Pelabuhan Kuala Pembuang, dan
- ✓ Pelabuhan Samuda.

Jumlah kapal laut yang melalui pelabuhan laut di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mengalami kenaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dimana pada tahun 2014 kapal laut yang melalui pelabuhan laut sebanyak 8.846 kapal, meningkat 5,88 persen dari tahun sebelumnya (8.355 unit kapal).

Gambar 2.14
Jumlah Kapal yang melalui Pelabuhan Laut
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

3. Bandar udara

Pada Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 9 buah bandar udara yang melayani penerbangan untuk berbagai tipe dan jenis pesawat terbang. Maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan antar kabupaten/kota maupun antar provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain: Garuda Indonesia, Lion Air, Trigana Air/Kalstar, Susi Air, dan Aviastar. Disamping itu, untuk melayani kota-kota kecil ada juga pesawat dari MAF yang terbang secara regular serta memiliki fasilitas sistem carter. Selain untuk pelayanan angkutan



barang dan penumpang, Bandara Tjilik Riwut saat ini juga membuka sekolah penerbangan (*flying school*).

Penerbangan udara berangkat dan datang ke wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini mengindikasikan berkembangnya wilayah Kalimantan Tengah karena semakin terbukanya aksesibilitas wilayah regional Kalimantan Tengah.

Tabel 2.11
Jumlah Penerbangan dan Penumpang yang melalui Bandar Udara
Di Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2009-2014

No	Tahun	Penerbangan (arus pesawat)		Penumpang	
		Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2009	6.556	6.577	270.573	264.385
2	2010	6.825	6.828	348.627	341.669
3	2011	8.948	8.955	501.879	499.663
4	2012	10.422	10.418	594.214	610.421
5	2013	12.496	12.507	629.568	664.567
6	2014	10.137	10.137	700.419	701.446

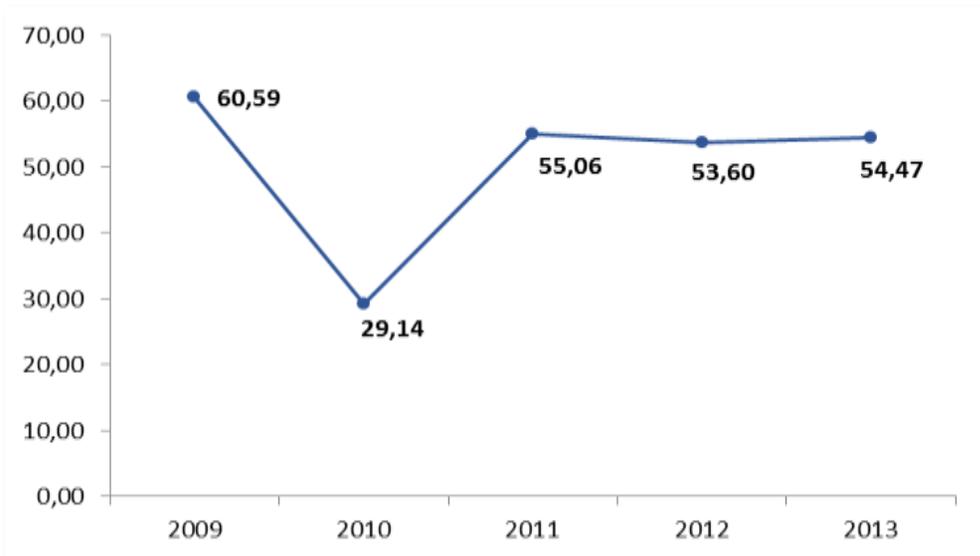
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

e) Pos, Telekomunikasi, dan Akomodasi

Jenis surat pos yang dikirim berupa surat biasa, tercatat, kilat biasa, kilat khusus, dan kilat tercatat pada tahun 2013 umumnya mengalami kenaikan dari 160.093 lembar pada tahun 2012 menjadi 177.860 lembar pada tahun 2013. Sementara pengiriman paket pos juga mengalami kenaikanyaitu dari 50.166 kg pada tahun 2012 menjadi 59.223 pada tahun 2013. Sedangkan untuk pengiriman wesel pos mengalami penurunan dari 193.702 lembar pada tahun 2012 menjadi 193.702 lembar pada tahun 2013.

Jumlah pelanggan telepon di tahun 2013 sebanyak 60.760 SST, sedangkan untuk pemasangan telekomunikasi pada warnet/internet mencapai 1.069 titik pada tahun yang sama.

Gambar 2.15
Tingkat Hunian Hotel Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2009-2013



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2014

Terkait fasilitas akomodasi di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 318 unit hotel pada tahun 2013 dengan kapasitas 5.976 kamar dan 8.859 tempat tidur. Dari sejumlah hotel tersebut, tingkat hunian hotel mencapai 54,47 persen pada tahun 2013 dimana angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya (53,60%).

f) Ketenagakerjaan

Hasil rilis ketenagakerjaan terakhir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2014 sebesar 1.154.489 orang. Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, maka penduduk yang bekerja di sektor formal sebanyak 40,64 persen yang terdiri dari status berusaha dibantu buruh tetap (3,51%) dan buruh/karyawan (37,13%). Sedangkan sisanya merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal dimana dalam sektor informal didominasi oleh penduduk yang berusaha sendiri (23,11%).

Jika dilihat berdasarkan sektor lapangan usahanya, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian (dalam arti luas) yang mencapai 613.186 orang (53,11%). Sektor lapangan usaha lain yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yakni sektor perdagangan sebanyak 178.791 orang (15,49%) dan sektor jasa sebanyak 168.817 orang (14,62%).

**g) Penanaman Modal dan Perbankan**

Peran perbankan dalam mendukung aktivitas perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan perkembangan positif sejalan dengan kontribusinya yang terus meningkat sesuai arah ekspansi ekonomi dalam 10 tahun terakhir. Berkenaan dengan hal tersebut, tren pertumbuhan berbagai indikator utama yaitu aset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit masih cenderung meningkat meskipun melambat pada triwulan IV-2013.

Jumlah bank yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan IV-2013 sebanyak 19 bank yang terdiri dari 12 (dua belas) bank umum konvensional, 4 (empat) bank umum syariah, dan 4 (empat) Bank Perkreditan Rakyat dimana total unit bank mencapai 149 unit.

Pada periode ini, pertumbuhan aset perbankan melambat disebabkan pertumbuhan kredit juga berada pada arah yang sama. Total aset perbankan sebesar Rp.23,08 triliun atau tumbuh 11,36 persen dimana laju pertumbuhan aset tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan III-2013 yang tumbuh sebesar 17,05 persen.

Berdasarkan lokasi operasionalnya, sebaran aset terbesar masih berada di Kabupaten Kotawaringin Timur yang mencapai Rp.8,45 triliun atau 36,64 persen dari total aset perbankan Provinsi Kalimantan Tengah. Pangsa aset perbankan di Kabupaten Kotawaringin Timur relatif menurun dalam 1 tahun terakhir yang disebabkan adanya peningkatan peran jumlah aset di daerah lain seperti Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Murung Raya, serta Kapuas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas penyaluran kredit setahun terakhir di daerah tersebut lebih ekspansif jika dibandingkan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selanjutnya, di Kota Palangka Raya terdapat aset perbankan sebesar 33,64 persen atau mencapai Rp.7,76 triliun, diikuti Kabupaten Kotawaringin Barat (9,55%), Barito Utara (5,87%), Kapuas (4,43%), Barito Selatan (3,07%), serta di beberapa kabupaten lain yang memiliki persentase cukup kecil. Adapun kenaikan share aset terbesar dalam setahun terakhir terjadi di Kota Palangka Raya diikuti oleh Kabupaten Barito Selatan dan Murung Raya.

Sedangkan pada realisasi penanaman modal di Provinsi Kalimantan Tengah, baik sumber modal dari dalam negeri maupun pihak asing mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, penanaman modal dari dalam negeri mencapai Rp. 17.390 milyar dan penanaman modal dari pihak asing mencapai Rp. 37.767 milyar.

**Fokus Pelayanan UrusanPilihan****a) Pertanian**

Melihat wilayah geografis dan sejarah sektor lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah selama ini, sektor yang paling memungkinkan untuk dikembangkan adalah sektor pertanian. Sektor tersebut memang menjadi sektor andalan mengingat ketersediaan lahan potensial masih cukup besar. Di sektor pertanian ini, sub sektor yang berpeluang tinggi untuk dikembangkan adalah sub sektor perkebunan yang terlihat dari kontribusi subsektor perkebunan dalam pembentukan PDRB (mencapai 12,11% pada tahun 2013). Dalam merealisasikan hal tersebut, saat ini sudah masuk permohonan investasi untuk mengembangkan pertanian di sub sektor perkebunan komoditas kelapa sawit, karet, dan singkong dalam skala cukup luas.

Tabel 2.12
Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Subsektor Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013

No	Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Karet	450.090,01	264.477,31	0,59
2	Kelapa Kopra	32.492,49	27.962,28	0,86
3	Kopi	2.051,53	824,98	0,40
4	Lada	781,83	131,55	0,17
5	Coklat	929,16	269,91	0,29
6	Kelapa Sawit	881.301,51	2.976.046,84	3,38

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2014

Pada sub sektor perikanan juga memiliki prospek cerah karena Provinsi Kalimantan Tengah memiliki cukup banyak kawasan perairan danau yang dapat dikembangkan menjadi usaha perikanan air tawar. Pada subsector ini, sebagian besar produksi dihasilkan dari budidaya perikanan keramba (22.954,26 ton) dan kolam 21.448,13 ton).



Tabel 2.13
Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2013 (Ton)

No	Jenis	Jumlah Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)
1	Tambak	9.224,46
2	Kolam	21.448,13
3	Keramba	22.954,26
4	Jaring Apung	862,65
5	Rumput Laut	87,51
6	Sawah	3,05

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2014

Produktivitas padi (sawah maupun ladang) di Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun kemarin hingga pada tahun 2013 mencapai 3,46 ton/ha dengan total produksi 864.608 ton.

Tabel 2.14
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2014

No	Tahun	Luas Panen		Produksi (ton)		Total luas panen	Total Produksi	Produktivitas Padi (ton/ha)
		Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2009	133.065	81.415	420.407	158.354	214.480	634.887	2,96
2	2010	146.964	100.082	451.762	197.075	247.046	698.808	2,83
3	2011	148.068	66.093	468.168	142.068	214.161	682.329	3,19
4	2012	168.733	83.054	569.818	185.689	251.787	821.605	3,26
5	2013	171.467	78.257	614.884	178.732	249.724	864.608	3,46
6	2014	190.755	55.330	725.704	127.325	246.085	853.029	3,47

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2014 dan Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalteng, 2015

Pada subsektor peternakan jenis ternak, untuk ternak besar populasi terbesar yaitu ternak babi mencapai 207.223 ekor, diikuti oleh ternak sapi (60.176 ekor) dan ternak kambing (46.519 ekor), sedangkan populasi ternak kecil (unggas) didominasi oleh ternak ayam ras pedaging yang mencapai 5.677.456 ekor diikuti ternak ayam buras (3.420.614 ekor) dan ternak itik (275.873 ekor). Jika dilihat dari produksi dagingnya, paling banyak produksi daging ayam ras pedaging yang mencapai 8.516.184 kg, diikuti daging sapi potong sebanyak 4.381.686 kg dan daging babi sebanyak 2.491.434 kg.



Tabel 2.15
Populasi dan Produksi Hasil Ternak Menurut Jenis Ternak
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)	Produksi Daging (Kg)	Produksi Telur (Kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Ternak			
1	Sapi Potong	60.176	4.381.686	-
2	Kerbau	10.551	48.735	-
3	Kambing	46.519	346.749	-
4	Domba	2.384	4.389	-
5	Babi	207.223	2.491.434	-
6	Kuda	-	-	-
B.	Unggas			
1	AyamBuras/Kampung	3.420.614	2.295.037	2.692.135
2	Ayam Ras/Petelur	42.692	42.693	285.033
3	Ayam Ras (Broiler)	5.677.456	8.516.184	-
4	Itik	275.873	151.090	1.536.419

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalteng, 2015

b) Perdagangan dan Jasa

Sektor perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Tengah yang paling berperan dalam penciptaan nilai tambah dan perlu dikembangkan potensinya adalah sektor perdagangan besar dan eceran. Kegiatan ini tersebar di sepanjang jalan utama pusat-pusat kota Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah dengan 13 kabupaten dan 1 kota, memiliki potensi dimana tiap-tiap wilayah dapat dikembangkan menjadi pusat jasa dan perdagangan, hotel, perkantoran, dan lain sebagainya.

c) Industri

Secara umum industri yang berkembang di provinsi Kalimantan Tengah meliputi industri pengolahan yang merupakan jenis usaha kecil, industri rumah tangga, dan industri menengah yang meliputi industri pangan, sandang, kerajinan, dan perkayuan. Dari beberapa jenis usaha kecil dan industri rumah tangga tersebut sudah dapat menampung tenaga kerja yang cukup besar sehingga sektor industri terutama mikro yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah berkembang dengan cukup baik. Dari data yang dihimpun, pada tahun 2013 terdapat 66 industri besar-sedang dan 4.807 industri kecil-menengah.

Tabel 2.16



**Jumlah Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2009-2013**

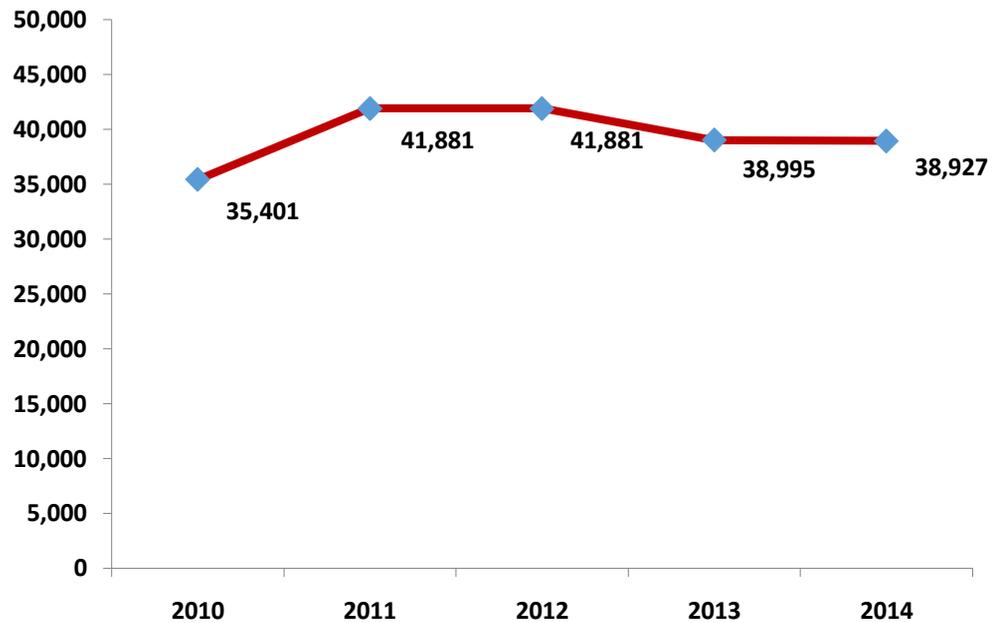
No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Industri					
	Besar dan Sedang	60	57	59	73	66
	Kecil Menengah	1.439	3.449	4.461	4.401	4.807
2	Jumlah Tenaga Kerja					
	Besar dan Sedang	18.906	17.317	19.571	15.485	14.761
	Kecil Menengah	4.328	11.761	15.205	15.103	16.814

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2014

d) Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan sektoral yang dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Hal tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan dimana akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan. Secara umum, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata terutama dikarenakan posisi geografis dan kondisi alamnya. Namun potensi yang belum dimaksimalkan tersebut menyebabkan perkembangan pariwisata terkesan stagnan dari waktu ke waktu yang terlihat dari penurunan jumlah wisatawan baik dalam maupun luar negeri dalam mendatangi tempat wisata di Kalimantan Tengah.

Gambar 2.16
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2014



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2014 dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov.Kalteng,2015

e) Pertambangan

Dari segi luas wilayah, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terbesar ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan wilayah yang sangat luas tersebut serta letak geografis yang dilalui oleh garis khatulistiwa, maka secara fisik kawasan ini memiliki beberapa hasil tambang yang cukup potensial. Bahan penggalan yang saat ini telah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi berkembang dengan pesat seperti batubara, emas (dan mineral pengikut seperti perak), bijih besi, pasir zircon (termasuk ilmenit dan rutil), galena, mineral bukan logam, intan, bauksit, dan batuan (bahan untuk bangunan). Dari keseluruhan jenis pertambangan tersebut, tambang batubara mendominasi baik terkait eksplorasi (1.812.542 ha) maupun produksinya (824.538 ha).

Tabel 2.17
Jumlah Izin Usaha Pertambangan dan Luas Wilayah (Eksplorasi dan Produksi)
Menurut Jenis Pertambangan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013

No	Jenis Pertambangan	Eksplorasi		Produksi	
		Jumlah IUP	Luas (Ha)	Jumlah IUP	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batubara	373	1.812.542	225	824.538
2	Zircon	43	197.217	68	113.852
3	Bijih Besi	41	213.243	18	38.623



No	Jenis Pertambangan	Eksplorasi		Produksi	
		Jumlah IUP	Luas (Ha)	Jumlah IUP	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Emas	21	146.709	18	91.902
5	Tembaga	1	8.315	0	0
6	Bauksit	8	39.204	10	13.487
7	Galena	10	65.127	1	2.100
8	Pasir	16	1.097	71	195
9	Pasir Kuarsa	8	20.727	0	0
10	Intan	1	10.000	0	0

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2014

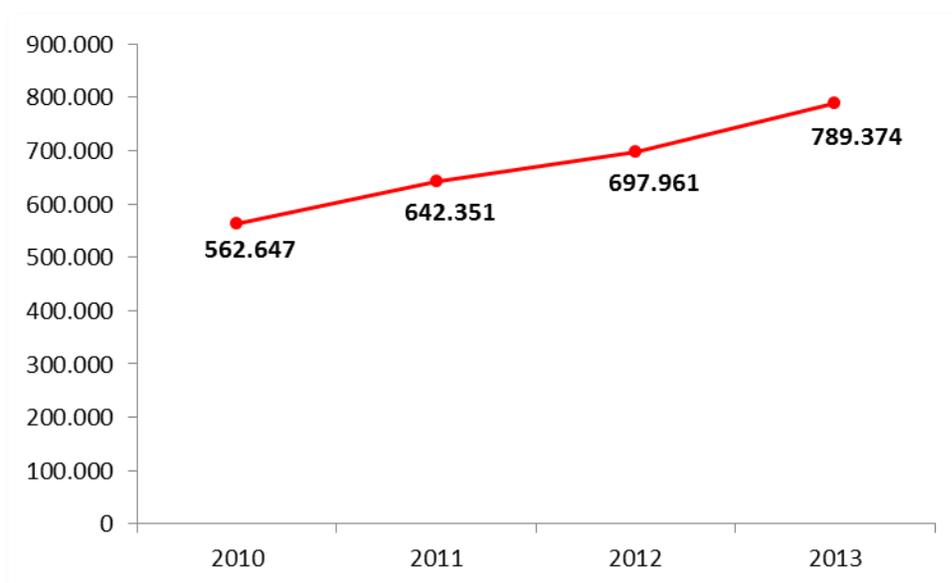
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah dan fokus fasilitas wilayah/infrastruktur.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Gambar 2.17
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi per Kapita/Bulan
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2013



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2014



Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Rata-rata pengeluaran per kapita meningkat selama empat tahun terakhir hingga pada tahun 2013 mencapai angka Rp. 789.374,-. Jika dilihat secara rinci berdasarkan kategori makanan dan non makanan maka pada tahun 2013, rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita (55,47%) lebih tinggi dibandingkan konsumsi non makanan (44,53%).

Tabel 2.18
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/Bulan
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2010-2013 (Rp)

No.	Tahun	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2010	342.761	219.886	562.647
2	2011	366.416	275.935	642.351
3	2012	391.357	306.604	697.961
4	2013	437.900	351.474	789.374

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2014

b. Nilai Tukar Petani

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi pertaniannya. NTP akan memperlihatkan kemampuan daya beli petani di wilayah pedesaan sehingga perekonomian petani dapat dianalisis terkait kesejahteraannya.

NTP pada bulan Desember tahun 2014 menunjukkan kurangnya kesejahteraan petani (secara umum) di Provinsi Kalimantan Tengah dimana NTP masih di bawah 100 yakni hanya sebesar 98,69. Jika dilihat dari subsektornya, NTP terbesar adalah petani pada subsektor hortikultura yang mencapai 105,00 dan terendah kesejahteraannya adalah petani tanaman perkebunan rakyat yang NTP-nya hanya mencapai 96,82.

Tabel 2.19
Nilai Tukar Petani per Subsektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Tengah, Desember 2014

No.	Subsektor	NTP
(1)	(2)	(3)
1	Tanaman Pangan	96,92
2	Hortikultura	105,00
3	Tanaman Perkebunan Rakyat	96,82
4	Peternakan	97,44
5	Perikanan	102,18
6	Gabungan	98,69

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2014

**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur****a. Luas Wilayah (RTRW Provinsi)**

Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki integrasi dan sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang wilayah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai wilayah yang sebagian besar masih tergolong hutan bioregion, Kalimantan Tengah memiliki RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang berfokus pada pengelolaan hutan. Dalam pengelolaannya, RTRW membagi wilayah menjadi dua kawasan yakni kawasan hutan lindung (2.456.640,93 ha) dan kawasan budidaya (12.886.055,07 ha).

Tabel 2.20
Luas Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
Provinsi Kalimantan Tengah (Perda No. 08 Tahun 2003)

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	Luas Wilayah (Ha)
(1)	(2)	(3)
A	Kawasan Hutan Lindung	
1	Hutan Lindung	766.392,06
2	Cagar Alam	235.079,45
3	Taman Wisata	19.142,61
4	Taman Nasional	488.056,29
5	Suaka Marga Satwa	71.664,71
6	Perlindungan dan Pelestarian Hutan	1.628,43
7	Konservasi Mangrove	31.018,40
8	Konservasi Air Hitam	37.225,55
9	Konservasi Flora dan Fauna	161.849,04
10	Konservasi Gambut Tebal	253.797,98
11	Konservasi Hidrologi	185.023,14
12	Kawasan Handil Rakyat	59.046,32
13	Perairan	155.716,95
Total Kawasan Hutan Lindung		2.465.640,93
B	Kawasan Budidaya	
1	Hutan Produksi Terbatas	3.784.495,64
2	Hutan Produksi	4.232.518,38
3	Hutan Kawasan Pengembangan Produksi	2.789.108,09
4	Hutan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain	1.920.054,79
5	Hutan Tanaman Industri	21.958,04
6	Areal Transmigrasi	137.920,13
Total Kawasan Budidaya		12.886.055,07

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2014

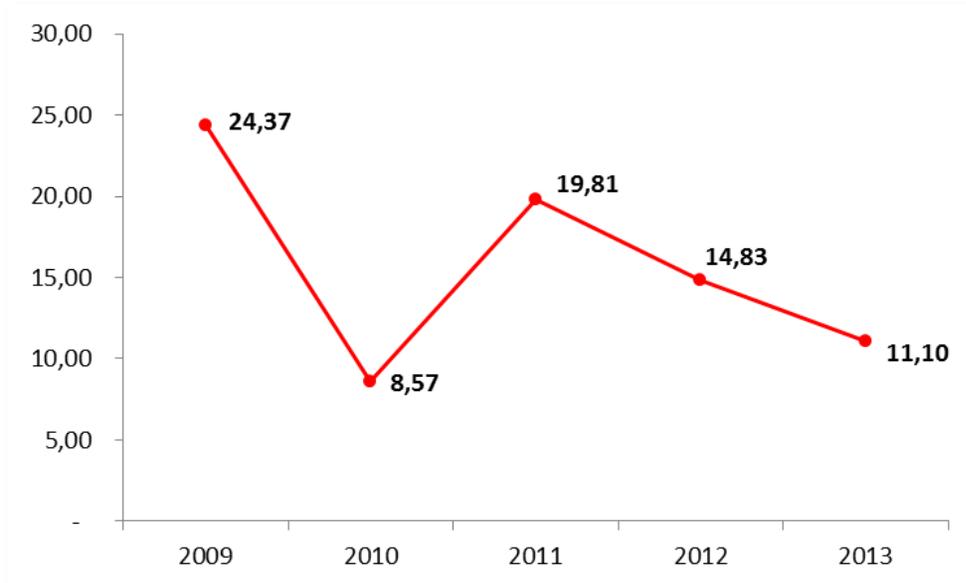
Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim berinvestasi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal maupun internal. Iklim investasi akan bergerak positif jika kondusivitas suatu wilayah terjaga dengan baik dan memiliki jaminan terhadap keamanan, kondisi demokrasi, hingga aspek sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itulah, keberlangsungan dan kekonsistenan investasi yang masuk ke suatu wilayah menjadi penting adanya untuk menentukan kestabilan pertumbuhan ekonomi.

a. Kriminalitas

Tingginya kriminalitas di suatu wilayah akan memicu penurunan status kenyamanan dalam berinvestasi oleh para investor. Situasi wilayah akan menjadi damai dan aman jika pihak yang berwenang dapat meredam atau meminimalisir kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum, angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi penurunan yang signifikan. Meskipun begitu, perlu adanya pengamanan khusus dalam beberapa kasus terutama yang terkait SARA mengingat pernah terjadi kejadian luar biasa di Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 2.18
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2013



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2014 (diolah)

Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang akan menentukan arah tujuan pembangunan daerah maupun nasional. Sebagai pondasi pelaksana pembangunan, setiap individu menjadi penentu dalam setiap pergerakan pembangunan melalui partisipasinya terhadap program kegiatan yang telah

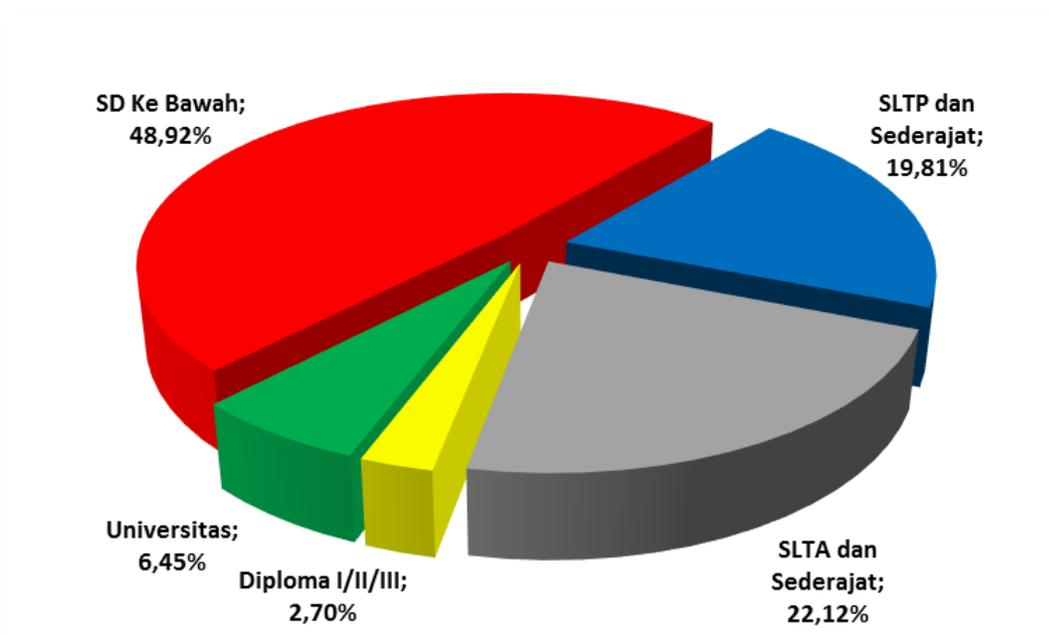
direncanakan. Oleh karena itulah, kuantitas disertai kualitas sumber daya manusia akan menjadi salah satu fokus tujuan awal pembangunan untuk memperkuat pondasi dalam merealisasikan perencanaan pembangunan daerah.

a. Kualitas Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian suatu wilayah dimana memiliki andil dalam meningkatkan kualitas sistem pembangunan daerah. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja di suatu wilayah, maka diasumsikan semakin tinggi pula kualitas perekonomian di wilayah tersebut. Meskipun begitu, tingginya kualitas tenaga kerja dalam hal ini tidak dipisahkan antara tenaga kerja yang berasal dari dalam wilayah maupun luar wilayah selama mereka bekerja untuk peningkatan perekonomian daerah tersebut.

Sebagian besar penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah hanya pernah mengenyam pendidikan hingga SD atau belum lulus SD bahkan ada yang tidak sekolah yakni sebesar 48,92 persen. Sedangkan tenaga kerja yang sekolah hingga perguruan tinggi hanya sebesar 2,70 persen yang memiliki pendidikan hingga Diploma I/II/III dan 6,45 persen tenaga kerja yang memiliki pendidikan hingga jenjang S1/S2/S3.

Gambar 2.19
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 (Agustus)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2014

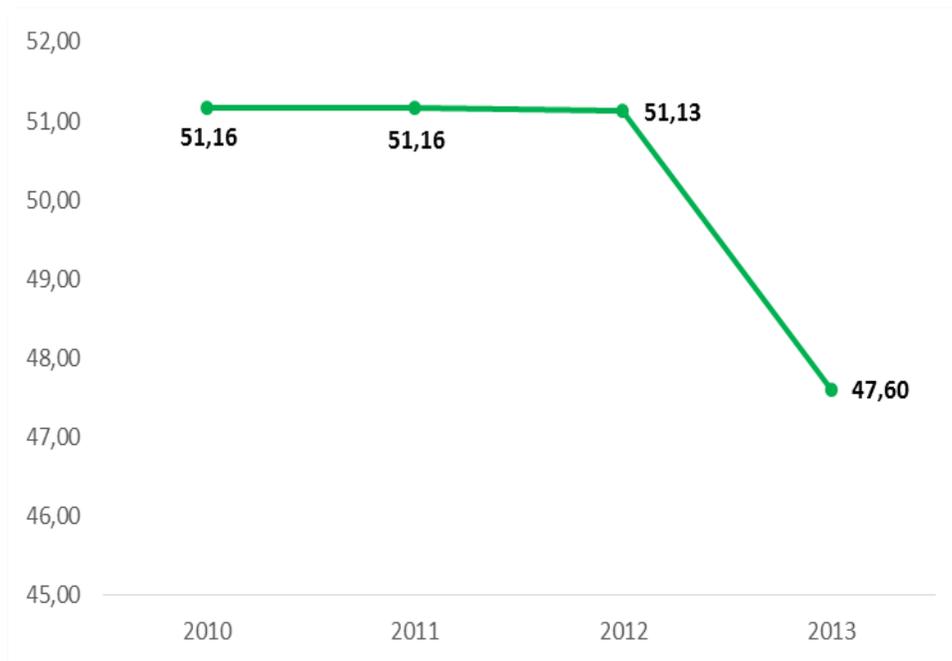


b. Rasio Ketergantungan

Salah satu analisis dalam melihat produktivitas penduduk suatu wilayah adalah dengan melihat sebaran kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki trend menurun yang berarti sebaran penduduk usia non produktif mulai berkurang jika dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Hal ini mengindikasikan ketergantungan penduduk usia non produktif semakin berkurang yang disebabkan beberapa kemungkinan seperti pergeseran usia remaja ataupun mortalitas penduduk usia tua.

Gambar 2.20
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2013



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2014



2.2. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu (Tahun 2014)

Memasuki tahapan-tahapan akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2010-2015, pemerintah daerah memiliki "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan yakni pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana terpapar dalam visi dan misi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, evaluasi pembangunan daerah terhadap program-program kerja pemerintah daerah akan menjadi tahapan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam penyelesaian perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan lima tahun yang lalu.

Dilaksanakannya evaluasi ini akan memberikan masukan mengenai ketidakcocokan atau kesalahan penetapan program prioritas, permasalahan baru yang timbul, hingga inefisiensi anggaran sehingga untuk perencanaan pembangunan ke depan dapat diantisipasi segala kendala maupun hambatan. Selain itu, evaluasi setiap tahapan pembangunan akan menyelaraskan setiap program kegiatan menuju ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2016, hasil evaluasi dari status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah didasarkan atas rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2014. Selain itu, evaluasi yang tidak kalah pentingnya adalah realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja setiap SKPD pada tahun 2014 dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 dan Renstra SKPD tahun 2010-2015 telah mencantumkan secara kuantitatif capaian indikator kinerja masing-masing SKPD sebagai target pembangunan untuk dinilai tingkat pencapaiannya setiap tahun (penilaian capaian dari 2011-2015). Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa indikator makro sebagai target pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2014 telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.

Berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator-indikator makro pembangunan daerah, realisasi indikator hingga tahun 2014 menunjukkan trend peningkatan. Sebagai salah satu fokus utama pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi dimana pada tahun 2014 mencapai 6,21 persen, yang mana angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang mencapai 7,38 persen. Dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi, maka target tahun 2014 (sebesar 7,3%) tidak tercapai.



Sementara itu, beberapa target pembangunan daerah lain juga belum tercapai sesuai harapan RPJMD seperti capaian inflasi meningkat hingga sebesar 7,07 persen (target sebesar 3,0%), angka kemiskinan sebesar 6,07 persen (target sebesar 2,5%), tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,24 persen kondisi agustus 2014 (target sebesar 2,5%), dan lain sebagainya. Bila dilihat dari capaian target pembangunan tahun 2014 tersebut, maka perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk mewujudkan pembangunan daerah sesuai target kinerja pembangunan tahun 2016 seperti yang telah dirumuskan dalam RPJMD. Oleh karena itu, dalam rangka “mengejar” pencapaian target RPJMD Tahun 2016 terutama untuk beberapa target yang belum tercapai pada tahun 2014, perlu dilakukan penajaman, penyempurnaan, revisi, hingga penggantian program/kegiatan yang telah ditetapkan sesuai RPJMD atau program/kegiatan strategispada perencanaan periode sebelumnya.

Tabel 2.21
Target dan Realisasi Kinerja Daerah dalam RPJMD
Provinsi Kalimantan Tengahtahun2011-2014

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA (%)							
		2011		2012		2013		2014	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,7	6,74	6,9	6,69	7,1	7,38	7,3	6,21
2.	Laju Inflasi (%)	6	4,55	5	5,85	4	6,79	3,0	7,07
3.	Angka Kemiskinan (%)	4,5	6,64	3,5	5,85	4	6,79	2,5	6,03
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5	2,55	3	3,17	2,75	3,09	2,5	3,24

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2014

Program/kegiatan yang mengacu pada empat strategi prioritas nasional yakni *pro poor*, *pro growth*, *pro job*, dan *pro environment*, perlu terus dilanjutkan pada tahun 2016. Berdasarkan data capaian di atas, meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2014 belum melebihi target, harapan kondisi perekonomian secara tidak langsung dapat menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebagaimana yang ditargetkan dapat terpenuhi. Secara umum memang laju inflasi, kemiskinan, maupun pengangguran tidak mencapai target, akan tetapi jika dilihat pada level nasional maka capaian pembangunan tersebut sudah dapat dikatakan luar biasa dari segi kuantitas nilai, namun dari segi kualitas harus diperhatikan pula sebagai penjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain strategi prioritas nasional, fokus utama dalam evaluasi pembangunan adalah pencapaian indicator sasaran perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.22
Pencapaian Indikator Sasaran pada Perencanaan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2014)	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Revitalisasi dan terciptanya klaster ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota	1.1 Teridentifikasinya klaster ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.	PDRB	7,3 %	6,21 %	
		1.2 Tumbuhnya klaster ekonomi unggulan daerah yang belum berkembang.	Jumlah cluster ekonomi/Industri kecil & menengah	4.500 unit usaha	4.868 unit usaha	
2	Terselenggaranya penataan ruang yang memerhatikan keberlanjutan sumberdaya wilayah.	2.1 Terwujudnya tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dan mengarusutamakan lingkungan.	Perda RTRW ditetapkan tidak bertentangan dengan RPJMD			
		2.2 Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup.	Data kualitas udara dan air			
			Dokumen KLHS, RPP LH, SLHD, NSDA telah terselesaikan			
			Rekomendasi Komda REDD dan Dewan Daerah Perubahan Iklim			



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2014)	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau	3.1 Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	SD: 75,16 % SMP: 89,46 % SMA: 92,84 %	SD: 75,16 % SMP: 82,15 % SMA: 92,53 %	Data yang tersedia bukan jumlah orang gurunya tapi persentase
			Jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	-	-	
			Rupiah per-pendidik	-	-	
			Rupiah per-tenaga kependidikan	-	-	
		3.2 Penaatan sistem pendidikan yang efektif dan efisien.	Angka Partisipasi Sekolah	SD: 98,92 SMP: 91,28 SMA: 66,24	SD: 98,68 SMP: 88,90 SMA: 66,24	
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	SD: 91,05 SMP: 43,18 SMA: 24,25	SD: 91,05 SMP: 60,70 SMA: 66,24	
			Rasio guru/murid	SD = 1:22 SMP = 1:20 SMA = 1:19	SD = 1:25 SMP = 1:22 SMA = 1:20	
			Angka putus sekolah	-	-	
			Angka kelulusan	-	-	
			Angka melanjutkan	-	-	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2014)	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,60	99,59	
4	Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah.	4.1 Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga pendidik	-	-	
			Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga kependidikan	-	-	
		4.2 Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat pendidikan.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	-	-	
			Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	-	-	
			Panjang jalan fungsional/waktu tempuh (jam)/biaya transport (Rp.)	-	-	
5	Meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau.	5.1 Tersedianya standar pelayanan kesehatan.	Tersedianya Regulasi standar pelayanan kesehatan	-	-	
		5.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan.	Rasio dokter per satuan penduduk	40:100.000	21,8:100.000	
			Rasio tenaga medis per satuan penduduk	40:100.000	36,8:100.000	
			Jumlah dokter yang memiliki ijin praktek			
6	Tersedianya akses infrastruktur Kesehatan	6.1 Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan	Rasio posyandu per satuan balita	10,87	9	



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2014)	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dasar hingga ke pelosok wilayah.		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,55	0,50	
			Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,08	0,008	
		6.2 Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Panjang jalan fungsional/waktu tempuh (jam)/biaya transport (Rp.)			
			Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization	80%	68,13%	
7	Terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.	7.1 Terwujudnya sistem transportasi, informasi dan komunikasi wilayah	Dokumen SISTRAWIL	-	-	
		7.2 Terwujudnya jaringan transportasi serta komunikasi dan Informatika	Sarana penunjang jaringan transportasi, komunikasi dan informatika	-	-	
		7.3 Terwujudnya peningkatan kelas bandara Tjilik Riwut dan Bandara penunjang di Kalimantan Tengah	Ditetapkannya bandara Tjilik Riwut sebagai bandara embarkasi haji antara	Sudah	Sudah	
8	Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.	8.1 Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan makro dan mikro, serta pencetakan sawah.	Luas pengairan/irigasi	109.288 Ha		
			Luas pencetakan sawah	-		



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2014)	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.	9.1 Tersedianya payung hukum bidang ketenagalistrikan dan energi	Perda/Perkada tentang kelistrikan dan energi	Ada	Ada	Sudah tersedia Perda Nomor 6 Tahun 2012 ttg. Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi
			Jumlah dan jenis energi alternatif yang dikembangkan	1.000 unit	264 unit	Target tidak tercapai karena keterbatasan anggaran
		9.3 Tersedianya sarana dan prasarana kelistrikan.	Pembangunan PLTU/PLTH/PLPH	90 %	86,25 %	Target tidak tercapai karena keterbatasan anggaran
			Jumlah rumah di daerah yang dialiri listrik	359.574	628.061	
			Rasio Ketersediaan Daya Listrik	150 %	65 %	
			Rasio desa berlistrik	79,5	77,3	
10	Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu	10.1 Tersedianya regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan.	Perda/Perkada bidang ekonomi			



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2014)	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		10.2 Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat	Persentase koperasi aktif	85%	73,03%	
			Jumlah UKM non BPR/LKM	42.500	298.979	
			Jumlah BPR/LKM	100	243	
		10.3 Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan	Jumlah pelatihan			
10.4 Terciptanya produktifitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal	PDRB	7,3%	6,21%			
11	Terwujudnya soliditas antar kelompok masyarakat	14.1 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera di bumi Tambun Bungai	Angka kriminalitas	2.260		
			Jumlah unjuk rasa	-	-	
			Sikap toleransi			
		14.2 Meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat lokal.	Jumlah grup kesenian	188	195	
			Jumlah gedung kesenian	17	19	



Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu (tahun 2014) yang meliputi seluruh program dan kegiatan, yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, berkaitan dengan realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2014 terhadap RPJMD dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Urusan Pekerjaan Umum

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Beberapa program yang belum memenuhi target kinerja adalah:

- 1.1. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- 1.2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik di Bidang Infrastruktur

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan:

- 2.1. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- 2.2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- 2.3. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
- 2.4. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan limbah
- 2.5. Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai
- 2.6. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- 2.7. Program pembangunan infrastruktur pedesaan
- 2.8. Program penggantian dan pemeliharaan jembatan tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah
- 2.9. Program perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan
- 2.10. Program peningkatan/pembangunan jalan
- 2.11. Program pemeliharaan berkala jalan dan jembatan
- 2.12. Program rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.



Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, untuk kegiatan Pembangunan/Peningkatan Drainase Primer dan sekunder Kota, Berkurangnya genangan air hujan dan meningkatnya kualitas drainase pada kawasan perkotaan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan:

Keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan,

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah

- 5.1. Jalan yang dalam kondisi baik tidak akan meningkat, karena kerusakan jalan tidak tertangani dan panjang Jalan yang dipelihara juga terbatas,

- 5.2. Jaringan Irigasi/Rawa terbatas, sehingga layanan air pada areal pertanian masih terbatas, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya target produksi pertanian, terutama padi.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- 6.1. Perlu dianggarkan dana untuk kegiatan-kegiatan yang belum tersedia dananya bagi pencapaian target program,

- 6.2. Perlu kegiatan-kegiatan prioritas karena keterbatasan dana untuk pencapaian target tahun terakhir RPJMD, dan apabila ada penambahan anggaran (dari pagu pada RKPD) agar dapat diprioritaskan pelaksanaan program/kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian target RPJMD.

B. Urusan Pendidikan

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Beberapa program yang belum memenuhi target kinerja adalah:

Beberapa program telah memenuhi target kinerja, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatannya tidak memenuhi target kinerja, realisasi kegiatan pada 4 (empat) program utama, yakni Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Menengah, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pelayanan Manajemen Pendidikan, Program



Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun II, dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan II tidak memenuhi target kinerja pelaksanaannya.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - 2.1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,
 - 2.2. Program Pendidikan Non Formal
 - 2.3. Program Pendidikan Luar Biasa
 - 2.4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
 - 2.5. Program Pendidikan Tinggi
 - 2.6. Program penelitian, pengembangan dan inovasi pendidikan
 - 2.7. Program pendidikan menengah II.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil untuk urusan pendidikan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,

Kewenangan provinsi di bidang pendidikan terbatas, walaupun jumlah uang cukup akan tetapi tidak dapat digunakan untuk program-program tertentu yang bukan kewenangannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah

Implikasinya bagi capaian program RPJMD adalah tidak tercapainya target dalam RPJMD yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang berusia sekolah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - 6.1. Perlu dianggarkan dana untuk kegiatan-kegiatan yang belum tersedia dananya bagi pencapaian target program,
 - 6.2. Karena menyangkut kewenangan, maka pendanaan melalui belanja tidak langsung di Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, untuk



pencapaian target kinerja pada tahun 2015 dalam hal ini akhir tahun periode RPJMD.

C. Urusan Kesehatan

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan adalah program obat dan perbekalan kesehatan, program pengembangan obat asli daerah, program standarisasi pelayanan kesehatan, program upaya kesehatan jiwa masyarakat, program kesehatan haji dan program pemberantasan penyakit tidak menular.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan adalah
 - 2.1. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 - 2.2. Program perbaikan gizi masyarakat
 - 2.3. Program pengembangan lingkungan sehat
 - 2.4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
 - 2.5. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
 - 2.6. Program peningkatan pelayanan jaminan kesehatan
 - 2.7. Program upaya kesehatan perorangan
 - 2.8. Program sumber daya kesehatan
 - 2.9. Program penanggulangan masalah kesehatan
 - 2.10. Penyuluhan masyarakat PHBS
 - 2.11. Program kesehatan lingkungan
 - 2.12. Program kefarmasian
 - 2.13. Program peningkatan perijinan sarana dan peralatan kesehatan
 - 2.14. Program kesehatan reproduksi remaja
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,
 - 3.1. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
 - 3.2. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,



Keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan,

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

D. Perhubungan

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, tidak ada
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - 2.1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 - 2.2. Program peningkatan pelayanan angkutan
 - 2.3. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
 - 2.4. Program peningkatan kelembagaan dan kualitas aparatur
 - 2.5. Program pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan
 - 2.6. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan II
 - 2.7. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
 - 2.8. Program kerjasama informasi dengan media masa
 - 2.9. Program pengembangan pos, telokumunikasi dan informatika
 - 2.10. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,

Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas, program penataan dan manajemen rekayasa lalu lintas
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,

Keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan,

E. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tidak ada



2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - 2.1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
 - 2.2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - 2.3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - 2.4. Program pengembangan wilayah transmigrasi
 - 2.5. Pengembangan masyarakat dan kawasan tertinggal
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,
 - 3.1. Program Pendayagunaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - 3.2. Program pengembangan data/informasi
 - 3.3. Program percepatan pertumbuhan kawasan strategis dan cepat tumbuh
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,

Keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan,
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat dlm rangka Program PM2L, sehingga implikasinya bagi capaian program RPJMD dengan tidak terlaksananya kegiatan adalah kemampuan calon pencari kerja di desa tidak meningkat keterampilannya atau terbatasnya pencari kerja di desa yang dapat dilatih sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka lapangan kerja baru sangat terbatas, kalah bersaing dan dapat menyebabkan tidak terjadi penurunan pengangguran yang akhirnya berdampak kepada upaya penurunan kemiskinan.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - 6.1. Perlu dianggarkan dana untuk kegiatan-kegiatan yang belum tersedia dananya bagi pencapaian target program,



6.2. Perlu penetapan kegiatan-kegiatan prioritas karena keterbatasan dana untuk pencapaian target tahun terakhir RPJMD.

F. Urusan Penanaman Modal

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, tidak ada.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - 2.1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
 - 2.2. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,
 - 3.1. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - 3.2. Program peningkatan pelayanan secara terpadu
 - 3.3. Program pengembangan iklim investasi
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,

Keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan,
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelatihan PTSP, sehingga implikasi apabila tidak dapat dilaksanakan adalah kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - 6.1. Perlu dianggarkan dana untuk kegiatan yang belum tersedia dananya bagi pencapaian target program/kegiatan tersebut,
 - 6.2. Penetapan kegiatan ini sebagai prioritas untuk dilaksanakan apabila tersedia anggaran, kalau diperlukan menggeser kegiatan lain yang masih dibawah prioritasnya.



G. Urusan Kehutanan

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

Beberapa program yang belum memenuhi target kinerja adalah:

1.1. Program perencanaan dan pengembangan hutan

1.2. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan

2.1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil untuk urusan kesehatan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,

Keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah

5.1. Upaya untuk percepatan pengurangan lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi terlambat sehingga daerah resiko bencana alam belum tertangani dengan baik dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan juga terlambat.

5.2. Kepastian kawasan hutan belum bisa terwujud sehingga kawasan hutan belum dapat berfungsi secara optimal.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

6.1. Perlu dianggarkan dana untuk kegiatan-kegiatan yang belum tersedia dananya bagi pencapaian target program tersebut,

6.2. Perlu penentuan kegiatan-kegiatan prioritas, karena keterbatasan dana untuk pencapaian target tahun terakhir RPJMD (tahun 2015).



H. Urusan Ketahanan Pangan

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan adalah :
 - 1.1. Program kerawanan dan kewaspadaan pangan
 - 1.2. Program good governance
 - 1.3. Program pengembangan kelembagaan dan SDM
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - 2.1. Program agribisnis pertanian dan keamanan pangan
 - 2.2. Program pengembangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat
 - 2.3. Program ketahanan pangan dan gizi keluarga
 - 2.4. Program peningkatan kesejahteraan petani
 - 2.5. Program peningkatan ketahanan pangan
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil untuk urusan ketahanan pangan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,

Tidak ada
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah,

Perlu adanya kerja keras untuk pencapaian target dari urusan ketahanan pangan ini untuk mencapai target RPJMD sampai dengan tahun 2015.

I. Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,

Tidak ada program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,



Semua program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,
Tidak ada program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,
Keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

J. Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan adalah program peningkatan produksi perikanan budidaya
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,
 - 2.1. Program pengembangan perikanan tangkap
 - 2.2. Program peningkatan daya saing produk perikanan
 - 2.3. Program pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir
 - 2.4. Program pengawasan dan pengendalian SDKP
 - 2.5. Program peningkatan kompetensi laboratorium perikanan
 - 2.6. Program pengembangan wirausaha
 - 2.7. Program perencanaan kelautan dan perikanan
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,
Tidak ada program atau kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,



Keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

K. Urusan Pertambangan dan Energi

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan adalah program pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perusahaan minyak dan gas serta program perusahaan listrik dan energi.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan :
 - 2.1. Program pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan
 - 2.2. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya mineral dan batubara, migas dan minyak bumi
 - 2.3. Program pembinaan dan pelayanan perijinan pertambangan
 - 2.4. Program pengembangan listrik dan pemanfaatan energi
 - 2.5. Program peningkat informasi bidang geologi
 - 2.6. Program pengawasan dan evaluasi pertambangan
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,

Tidak ada program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,

Keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



L. Urusan Lingkungan Hidup

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,
Tidak ada program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,
Hampir semua program memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,
Tidak ada program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,
Keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

M. Urusan Perindustrian dan Perdagangan

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, tidak ada
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,
 - 2.1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - 2.2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
 - 2.3. Program peningkatan dan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - 2.4. Program penumbuhan industri agro
 - 2.5. Program pengembangan industri kecil dan menengah



3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,

Tidak ada program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,

Peralatan sarana dan prasarana yang belum memadai.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

N. Urusan Pertanian dan Peternakan

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,

Tidak ada program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,

Semua program memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,

Tidak ada program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,

Keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah



6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

O. Urusan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan, adalah program Tanggap Darurat
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan adalah :
 - 2.1. Program dukungan manajemen teknis
 - 2.2. Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan adalah program tanggap pasca bencana
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,
 - Keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

P. Urusan Koperasi dan UMKM

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,
 - Tidak ada program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,
 - Semua program memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan,
 - Tidak ada program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.



4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan,
 - Keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Uraian secara rinci terkait dengan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 yakni berupa tabel evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun 2014 Provinsi Kalimantan Tengah, tidak termasuk dalam dokumen RKPD ini, tetapi merupakan data dukung (*worksheet*). Uraian evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 sebagai contoh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana tabel 2.24.

Adapun status capaian target kinerja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014 tergambar tabel 2.23.

Tabel 2.23
Jumlah Program berdasarkan Status Capaian Target Kinerja
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2014

No	Urusan	Jumlah Program		
		Memenuhi Target Kinerja	Tidak Memenuhi Target Kinerja	Melebihi Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Urusan Pekerjaan Umum	12	2	1
2	Urusan Pendidikan	7	5	0
3	Urusan Kesehatan	14	6	2
4	Perhubungan	10	0	2
5	Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	0	3
6	Urusan Penanaman Modal	2	0	3
7	Urusan Kehutanan	2	2	0
8	Urusan Ketahanan Pangan	5	3	0
9	Urusan Kebudayaan dan Pariwisata	semua	0	0
10	Urusan Kelautan dan Perikanan	7	1	0
11	Urusan Pertambangan dan Energi	6	2	0
12	Urusan Lingkungan Hidup	hampir semua	0	0
13	Urusan Perindustrian dan Perdagangan	5	0	0



No	Urusan	Jumlah Program		
		Memenuhi Target Kinerja	Tidak Memenuhi Target Kinerja	Melebihi Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Urusan Pertanian dan Peternakan	semua	0	0
15	Urusan Penanggulangan Bencana Daerah	1	2	1
16	Urusan Koperasi dan UMKM	semua	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2015

Dari hasil evaluasi untuk kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, berkenaan dengan realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2014 di atas, maka faktor penyebab belum terlaksananya program/kegiatan tersebut adalah :

1. Keterbatasan anggaran untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang direncanakan, serta pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada triwulan III dan IV.
2. Berkenaan dengan beberapa urusan pemerintahan seperti pendidikan karena masih terbatasnya kewenangan provinsi, di mana walaupun jumlah uang cukup akan tetapi tidak dapat digunakan untuk program-program tertentu yang bukan kewenangannya.

Untuk itu maka kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

1. Perlu adanya anggaran dana untuk kegiatan-kegiatan yang belum tersedia dananya atau penambahan dana pada kegiatan-kegiatan tertentu bagi pencapaian target program tahun 2015;
2. Perlu penetapan kegiatan-kegiatan prioritas karena keterbatasan dana untuk pencapaian target tahun terakhir RPJMD;